



KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Bappebti/Mjl/128/X/2011/Edisi November

KONTRAK BERJANGKA

MENGABDI DENGAN INTEGRITAS



**Multilateral 'Main Course'
& SPA 'Appetizer'**



**Ekspor Dihentikan
Rotan Masuk SRG**



**SRG BUKTI
DAYA SERAP
KOMODITI LOKAL**





DARI REDAKSI

Keberhasilan instrumen Sistem Resi Gudang (SRG) dibuktikan dengan bersinerginya lintas instansi terkait baik di pusat maupun di daerah. Sulit dibayangkan jika implementasi SRG hanya dibertitik tolak dari Kementerian Perdagangan atau Bappebti.

Oleh karena itu, ego sektoral harus dikikis habis dan tunduk pada Undang-undang No. 9/2011, tentang SRG. Sebab, undang-undang tersebut bukan milik Kementerian Perdagangan semata, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia.

Beberapa waktu lalu, Buletin Kontrak Berjangka, berkesempatan mengunjungi gudang SRG yang terdapat di Subang, Jabar. Dari kunjungan itu, sangat nyata masih minim dukungan baik dari pemerintah daerah melalui dinas terkait, elit politik lokal maupun pelaku komoditi. Hal itu dapat terjadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat dan keuntungan SRG.

Jadi, lagi-lagi kunci edukasi dan sosialisasi yang masif.

Di sisi lain, Satgas SRG yang dibentuk Bappebti harus menunjukan kinerja yang maksimal, guna melahirkan berbagai kebijakan yang mendukung dan mempercepat implementasi SRG di daerah.

Pemerintah Pusat tidak memiliki anggaran yang cukup banyak untuk membangun gudang SRG di berbagai daerah. Tetapi dengan kekuatan dan bersinerginya lintas sektoral, instrumen pembiayaan pasca panen ini akan dapat berjalan dengan baik. Misalnya, memanfaatkan gudang swasta sebagai penyimpanan komoditi yang

menjadi jaminan pembiayaan SRG.

Pembaca yang budiman, satu hal yang menarik dari sajian Redaksi kali ini, yakni penuturan Bambang, pada Rubrik Interviu. Bambang adalah seorang inisiator dan pembina Lembaga Ekonomi Masyarakat Sejahtera (LEMS) di Provinsi Kendari. Tahun 2009, LEMS digalang dengan mengumpulkan sejumlah petani kakao untuk bersekutu melawan kekuatan kartel atau tengkulak yang merajalela di wilayah itu.

Dengan LEMS, petani diarahkan menghasilkan biji kakao berfermentasi. Dengan harga jual kakao yang lebih tinggi, petani diwajibkan menyishkan dana sebesar Rp 1 juta yang digunakan sebagai dana talangan jika petani membutuhkan dana segar. Kini LEMS telah menjalar didesa-desa dari empat kabupaten di Kendari. Jumlahnya sudah sebanyak 20 LEMS, dan dana anggota yang terkumpul sudah lebih dari Rp 3 miliar.

LEMS yang telah mengakar dimasyarakat Kendari, berkeinginan mengembangkan lembaga ekonomi pedesaan itu dengan fasilitas SRG. Harapan Bambang, biji kakao fermentasi yang dihasilkan LEMS dimasukan dalam skema SRG. Dengan demikian posisi tawar petani kakao semakin tinggi.

LEMS yang didirikan Bambang, nyaris mirip dengan apa yang dilakukan Muhammad Yunus, di Banglades, yang merintis Bank Grameen. Bank ini merupakan lembaga yang meretas kemiskinan rakyat Banglades.

Pembaca budiman, tentunya masih ada banyak informasi yang disajikan Redaksi pada edisi ini. Termasuk upaya dari Majalah Investor yang memberi apresiasi pada perusahaan pialang berjangka terbaik tahun 2011. 'Nah, selengkapnya informasi lain silahkan dibaca dan semoga bermanfaat.

Salam!



KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Penerbit: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Penasihat/Penanggung Jawab: Syahrul R. Sempurnajaya

Pemimpin Redaksi: Nizarli **Wakil Pemimpin Redaksi:** Natalius Nainggolan

Dewan Redaksi: Harry Prihatmoko, Diah Sandita Arisanti, Poppy Juliyanti, Subagyo, Dharmayugo Hermansyah, Sri Haryati, Rizali Wahyuni **Sirkulasi:** Sapin Siswantoro, Katimin.

Alamat Redaksi: Gedung Bappebti Jl. Kramat Raya No. 172, Jakarta Pusat. www.bappebti.go.id

Redaksi menerima artikel ataupun opini dikirim lengkap dengan identitas serta foto ke E-mail: buletin@bappebti.go.id

DAFTAR ISI



12-13

Interview

Bambang
LEMS Lokomotif Kakao
Fermentasi Sultra



20-21

Komoditi

Gunakan Kencur Penyakit Lacur



28

Kiprah

Hari Setiobudi
Lebih Nyaman Transaksi
Multilateral



Info Utama.....4-7

- SRG Bukti Daya Serap Komoditi Lokal
- Multilateral 'Main Course' & SPA 'Appetizer'

Berjangka8-9

- Segera Dibentuk Asosiasi Tunggal PBK
- Rame-Rame Bidik Kampus

Resi Gudang10-11

- Bank Jatim Utamakan SRG
- Bappebti Latih 'Duta' SRG

Agenda Foto14-15

Aktualita.....16-17

- Luncurkan Olein BKDI Menuju Palm Oil Complex
- Transaksi PLAN dan Multilateral BKDI Melejit
- Indonesia Negara Ketiga Atur Transaksi OTC
- Ekspor Dihentikan Rotan Masuk SRG

Analisa.....18

Info Harga.....19

Breaknews.....22-23

- Industrial downstream drove Non-oil Export
- Damping rates plummeted rattan will join warehouse receipt system
- Coal contracts and Index drove low calorie exploration
- Indonesian Spice Import is increasing continually

Wawasan.....24-25

- Fatwa Perdagangan Komoditi Syariah

Kolom.....26-27

- Alasan LKB lebih Dari Satu

SRG Bukti Daya Serap Komoditi Lokal

Efektifitas instrumen SRG ditunjukkan dengan kebijakan yang bersinergi antara instansi terkait. Guna meningkatkan daya serap komoditi lokal, perlu kebijakan khusus untuk menentukan resi gudang sebagai salah satu alternatif bukti penyerapan komoditi lokal oleh importir pangan.

Kabupaten Subang, Jawa Barat, merupakan salah satu sentra produksi beras ketan nasional. Dari daerah ini pertahunnya diproduksi sekitar 10.000 ton beras ketan, yang dihasilkan dari dua kali masa tanam. Sebagai daerah penyangga, Kab. Subang, juga menjadi salah satu barometer pasar beras ketan nasional. Hal itu didukung produksi dan kualitas yang baik. Dan di sisi lain, letak geografis daerah ini lebih dekat dengan tujuan pasar yakni Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta.

Dengan berdirinya gudang Sistem Resi Gudang (SRG) di Kecamatan Binong, Kab. Subang, ditahun 2010, petani beras ketan berharap instrumen ini bisa meningkatkan kesejahteraan-

nya dan tertatanya pasar beras ketan di wilayah itu. Namun, saat ini petani Subang kurang menikmati harga akibat beras ketan impor yang juga beredar di wilayah itu.

Menurut Hety Yoheti, Ketua KSU, Annisa, instrumen SRG merupakan salah satu solusi dalam memperkuat posisi tawar petani di saat musim panen. Hety adalah salah satu pelaku SRG Subang yang menggerakkan Gapoktan beras ketan.

"Saat ini ada kebijakan dari Kementerian Pertanian yang mensyaratkan importir untuk menyerap beras ketan lokal, sebelum impor beras ketan masuk ke dalam negeri. Berdasarkan Kebijakan Kementerian Pertanian itu, setiap importir diwajibkan menyerap beras ketan lokal melalui Gapoktan sebesar 7,5 % dari total impor ketan 1.000 ton. Pada dasarnya, kebijakan itu membantu petani, tetapi praktiknya petani tidak menikmati kebijakan itu," jelas Hety.

Lebih jauh dituturkan Hety, ketika importir mau mengajukan izin impor ketan, mereka datang ke Subang, dan meminta rekomendasi dari Gapoktan bahwa pihaknya telah menyerap beras ketan petani. Memang ada yang terserap, tetapi hanya sebagian kecil sebagai bukti pada dinas terkait. Kalau mereka impor 1.000 ton, seharusnya yang diserap dari petani sekitar 75 ton. Tetapi realisasinya paling besar sebanyak 40 ton.

"Pada hal seharusnya, dengan adanya serapan lokal itu petani bisa memiliki posisi tawar untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Nyatanya, beras ketan lokal tidak terserap dan berakibat

harga turun karena impor ketan masuk dalam negeri. Bahkan, untuk menekan harga penjualan petani, beras ketan impor itu beredar di sekitar Subang," papar Hety.

"Yang lebih parah lagi, rekomendasi dari Gapoktan dan sudah mendapat stempel dari dinas terkait, diperjual-belikan dengan harga yang cukup fantastis. Satu dokumen dihargai sekitar Rp 150 juta. Harga sebesar Rp 150 juta itu, diperhitungkan dari subsidi impor beras ketan yang kemudian dipasarkan di dalam negeri," kata Hety.

Jadi, importir itu mendapat keuntungan dari dua sisi, yakni dari selisih harga impor dan membeli beras ketan lokal dengan harga murah, tambah Hety.

Preseden Buruk

Sementara itu, Sutaryo, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar, Subang, mengakui bahwa rekomendasi Gapoktan itu banyak beredar di wilayahnya dan menjadi preseden buruk terhadap pasar ketan terutama di Subang.

"Seharunya dengan adanya kebijakan dari Kementerian Pertanian itu, beras ketan Subang terserap habis setiap musim panen. Tetapi realitanya stok menumpuk dan harga cenderung rendah," kata Sutaryo.

Senada dengan itu, Kabid. Pedagangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar, Subang, Bambang Suendar, mengatakan, yang terjadi saat ini dengan beras ketan petani adalah perdagangan antar daerah. "Kalau pun

Hety Yoheti



importir menyerap ketan Subang, jumlahnya hanya sedikit. Sehingga dengan kondisi seperti itu, petani kurang bergairah dan cenderung menjual hasil panen saat masa panen dengan harga yang relatif rendah.”

“Oleh karena itu kami mengusulkan kepada Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Perdagangan, untuk mengeluarkan kebijakan penyerapan beras ketan lokal disertai dengan bukti kepemilikan atas Resi Gudang,” kata Bambang.

“Kebijakan Kementerian Pertanian itu tetap dijalankan, tetapi didampingi dengan kebijakan Kementerian Perdagangan yang mensyaratkan importir menyerap beras ketan lokal dari gudang SRG,” ujar Bambang.

Lebih jauh diutarakan Sutaryo, jika ada kebijakan dari Kementerian Perdagangan yang menyatakan bukti daya serap impor ditunjukkan dengan kepemilikan Resi Gudang, petani pasti lebih bergairah dan instrumen SRG di Subang berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

“Kalau ada kebijakan seperti itu, saya yakin daerah Subang akan kekurangan gudang,” kata Sutaryo

Sinergi

Tekait dengan itu, Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Deddy Saleh, dalam sebuah kesempatan baru-baru ini mengatakan, pihaknya saat ini tengah menginventarisasi kebijakan penyerapan komoditi lokal. Hal itu ditujukan untuk memperkuat dan mempercepat implementasi SRG di berbagai daerah.

“Saat ini kami sedang melihat-lihat kebijakan mana yang bisa disinergikan dengan SRG. Terutama bagi pelaku



Sutaryo

importir pangan, akan disyaratkan kepemilikan Resi Gudang dapat dijadikan bukti daya serap lokal,” tegas Deddy Saleh.

Seperti halnya importir beras ketan, tambah Deddy Saleh, kebijakan dari Kementerian Pertanian sudah tepat, dan dari sisi kami pun nantinya akan ditambahkan dengan bukti kepemilikan Resi Gudang.

“Kita harapkan dalam waktu dekat, minimal tahun 2012 sudah ada kebijakan itu. Tentunya kami pun akan mengkaji dan mempertimbangkan kepentingan petani, khususnya petani ketan,” tandas Deddy Saleh.

Di pihak lain, Direktur Pemasaran Domestik, Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian, (Ditjen P2HP), Mahpudin, mengatakan, Resi Gudang sebagai bukti kepemilikan komoditi pangan yang tersimpan di gudang Sistem Resi Gudang (SRG) dapat dijadikan bukti penyerapan komoditi lokal. Meski Resi Gudang dapat



Bambang Suhendar

berpindah tangan kepada pihak lain sebelum jatuh tempo, petani sudah terbantu dalam mengatasi rendahnya harga di masa panen raya.

“Saya pikir, Resi Gudang bisa dijadikan sebagai bukti penyerapan komoditi pangan lokal oleh pihak importir. Dan mekanisme itu cukup efektif. Karena, terbitnya Resi Gudang itu pun datangnya dari petani atau Gapoktan,” jelas Mahpudin.

Menanggapi hal itu, Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa, Bappebti, Sutriyono Edi, mengatakan, kami sudah mempelajari dan mengkaji case ini. Hal itu merupakan masukan yang baik untuk pengembangan SRG di masa mendatang.

“Saat ini sudah ada Satgas SRG yang terdiri dari lintas kementerian, tentunya hal itu akan dibahas dan menjadi masukan untuk pembuatan kebijakan dimasing-masing instansi. Pasti Bappebti akan mendukung kebijakan yang menguntungkan petani,” terang Sutriyono Edi.

BJB Proaktif, Subang Kurang Gudang

Bank Jabar Banten (BJB), merupakan salah satu pilar berjalannya mekanisme SRG di Subang. Keterlibatan BJB sebagai bank pembiayaan SRG sudah berjalan sejak tahun 2010. Menurut Manajer Komersial BJB, Cabang Subang, M. Noerachman, pihaknya cukup proaktif memasyarakatkan SRG.

“Kami sangat mendukung program pembiayaan SRG. Hal itu dibuktikan dengan proses pencairan pembiayaan lebih cepat, jika seluruh persyaratan yang diperlukan sudah lengkap BJB bisa mencairkan pembiayaan dalam tempo sekitar 1 jam,” jelas Noerachman.

Menurut Noerachman, BJB Cabang Subang di tahun 2011 dalam dua musim tanam beras ketan, sudah menyalurkan pembiayaan SRG yang nilainya mencapai Rp 3 miliar.

Lebih jauh diutarakan Noerachman, mungkin sama halnya dengan di daerah lain, pembiayaan SRG ini belum merata diketahui kalangan petani. Karena itu masih perlu edukasi dan so-

sialisasi.

“Khususnya di daerah Subang, kami pikir masih perlu dibangun gudang yang lebih banyak, sehingga produksi petani dapat tertampung dan instrumen SRG bisa berjalan lebih memasyarakat,” jelas Noerachman.

Sementara itu, menurut Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar, Subang, Sutaryo, untuk menampung beras ketan produksi petani Subang, setidaknya dibutuhkan tiga gudang SRG. Karena Subang pertahunnya produksi 10.000 ton beras ketan.

“Kalau hanya ada satu gudang, dari wilayah lain akan kesulitan untuk menikmati fasilitas SRG itu. Makanya kami sudah memprogramkan dan mengajukan kepada Pemerintah Pusat untuk menambah pembangunan gudang sebanyak dua unit lagi. Dua unit gudang yang kami harapkan dibangun, tambahannya, yakni disentra beras ketan Kecamatan Patokbeusi dan Kecamatan Pusakajaya,” imbuh Sutaryo. ▲

Multilateral 'Main Course' & SPA 'Appetizer'

Meningkatkan kinerja transaksi kontrak berjangka multilateral memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Apresiasi hanya pantas diberikan kepada pelaku yang menciptakan bursa sebagai sarana pembentukan harga dan lindung nilai.

Bursa berjangka tanah air tahun 2012 harus bisa meningkatkan kontrak berjangka komoditi dalam transaksi multilateral. Bursa harus menangkap peluang dari kebijakan pemerintah di tengah menggalakan industri hilir dari sejumlah komoditi yang dihasilkan di tanah air. Sejalan dengan itu, para pelaku industri membutuhkan instrumen perdagangan berjangka komoditi sebagai saran risk manajemen dan pembentukan harga komoditi.

Pemerintah tetap memberi tempat bagi pelaku pasar perdagangan berjangka dalam transaksi bilateral atau Sistem Perdagangan Alternatif (SPA). Karena itu pemerintah mengatur dan mengawasi perdagangan bilateral ini melalui perubahan Undang-undang No. 32/1997, tentang perdagangan berjangka komoditi, menjadi Undang-undang No. 10/2011.

"Kami menganalogikan perdagangan bilateral itu layaknya appetizer yakni hidangan pembuka. Sedangkan main course-nya atau hidangan utama adalah kontrak berjangka multilateral," demikian antara lain dikatakan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Syahrul R. Sempurnajaya, disaat memberi sam-

butan penganugerahan pialang terbaik versi Majalah Investor, 24 November 2011, di Jakarta.

Oleh karena itu saya selalu menghimbau dalam setiap kesempatan terutama kepada perusahaan pialang berjangka, untuk meningkatkan transaksi kontrak berjangka multilateral. Karena transaksi multilateral itu lebih riil, dan multi efeknya akan berdampak hingga ke petani, tambah Syahrul R. Sempurnajaya.

Sementara itu, Sekjen Kementerian Perdagangan, Ardiansyah Parman, yang mewakili Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan, yang berhalangan hadiri perhelatan itu, mengatakan, kedua busar harus bisa mewujudkan mimpi industri perdagangan berjangka komoditi sebagai referensi harga dunia.

"Dari laporan yang saya terima transaksi multilateral sudah signifikan meningkat. Tetapi masih perlu ditingkatkan lagi, karena masih sangat jomplang dibandingkan dengan transaksi bilateral," papar mantan Kepala Bappebti itu.

Lebih jauh diutarakan Ardiansyah, transaksi multilateral selama 2009 mencapai 17.000 lot, kemudian meningkat lebih dari 1.200 % tahun berikutnya menjadi 232.000 lot. Dan hingga akhir Ok-

tober 2011, transaksi multilateral mencapai 726.000 lot. Namun, transaksi SPA hingga oktober 2011 sudah mencapai 6,3 juta lot.

"Oleh karena itu, saya tetap mengharapkan agar pelaku industri perdagangan berjangka fokus dalam mengembangkan transaksi multilateral sehingga Indonesia menjadi acuan harga komoditi dunia. Khususnya transaksi komoditi seperti komoditi minyak kelapa sawit, kopi, kakao, lada, karet, timah emas, batubara, gas dan minyak bumi," terang Ardiansyah Parman.

Selain dua pejabat teras Kementerian Perdagangan, tersebut, acara ini juga dihadiri Dirut Jakarta Futures Exchange (JFX), Made Soekarwo, Dirut Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKD), Megain Widjaja, mantan Dirut JFX, Hasan Zein Mahmud, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Fadhil



Hasan, dan sejumlah direksi perusahaan pialang berjangka.

Waspada

Syahrul R. Sempurnajaya, lebih jauh mengatakan, dengan dimasukkannya perdagangan SPA ke dalam Undang-undang No. 10/2011, pengawasan dan penegakan peraturan semakin ketat. "Selain itu, sanksi yang dikenakan kepada pihak yang melanggar peraturan dan perundang-undangan pun lebih tinggi. Mungkin lebih berat dibandingkan sanksi Tipikor. Jadi para pelaku harus tetap lebih waspada dan berada di jalur yang benar," jelas Syahrul.

Senada dengan itu, Ardiansyah Parman juga mengatakan, industri perdagangan berjangka komoditi ini merupakan industri yang high risk high return. Karenanya para pelaku harus menghindari praktik-praktik yang dilarang peraturan dan perundang-undangan.

"Belakangan ini kita ketahui masih ada pihak-pihak yang melakukan praktik perdagangan berjangka ilegal. Modusnya mereka selalu mengundang masyarakat untuk mengikuti seminar gratis di hotel-hotel. Melalui seminar itu mereka janjikan fixed income, keuntungan yang tinggi dan lain sebagainya, tetapi pada akhirnya tindakan itu merugikan masyarakat," jelas Ardiansyah.

"Intinya seperti ini saja, kalau memang mereka bisa pastikan keuntungan tinggi, mengapa tidak mereka saja yang investasi? Sehingga dia bisa lebih kaya. Tetapi karena niatnya mau menipu masyarakat maka mereka menjanjikan keuntungan besar," katanya.

Oleh karena itu, jelas Ardiansyah lebih jauh, kita minta Bappebti dengan dukungan berbagai pihak penegak hukum untuk memberantas praktik-praktik ilegal tersebut. Dukungan dari industri pers pun tidak terlepas untuk mencegah lebih dini praktik ilegal ini, sehingga tidak meluas masyarakat yang menjadi korban penipuan.

"Kalau semakin meluas masyarakat yang menjadi korban penipuan itu, maka akan semakin sulit pula untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Jadi mari kita

saling bahu-membahu mensosialisasikan manfaat dan tujuan perdagangan berjangka ini, termasuk praktik yang dilarang," tegas Ardiansyah Parman.

Memacu Multilateral

Dalam diskusi panel yang dipandu Pemred Majalah Investor, Primus Dorimutu, di tempat yang sama, Fadhil Hasan, mengatakan, belum berkembangnya bursa berjangka di tanah air sebagai sarana pembentukan harga dan lindung nilai dari berbagai komoditas, karena panjang dan kompleksnya persoalan.

Menurut Fadhil Hasan, tingginya produksi crude palm oil (CPO) Indonesia saat ini berjalan tanpa diimbangi aspek infrastruktur pasar, baik bursa maupun pasar fisik, dan infrastruktur lainnya.

"Coba kita melihat perkembangan industri CPO di tanah air, sejak tahun 1990-an hingga saat ini produksi CPO Indonesia naik signifikan tetapi tetapi pemerintah alpa memperhatikan infrastruktur. Dengan demikian pasar di dalam negeri tidak berkembang, alhasil para pelaku CPO melakukan lindung nilai dan mengacu harga di pasar luar negeri," jelas Fadhil Hasan.

Lebih jauh dikatakannya, Kantor Pemasaran Bersama yang seharusnya menjadi ruang bagi PTP Nusantara ternyata hanya mentransaksikan kurang dari 50 % dari seluruh CPO produksi BUMN itu. "Jadi, disinilah perlu political will yang lebih kuat dari pemerintah."

"Pembangunan pelabuhan untuk pengapalan CPO masih terbatas. Hingga kini pelabuhan utama pengapalan CPO hanya Belawan dan Dumai, sementara di wilayah Kalimantan belum ada yang memadai. Pada hal, ke depan Kalimantan akan menjadi penghasil CPO terbesar, tetapi saat ini belum memiliki pelabuhan utama CPO," ujar Fadhil Hasan.

"Jadi dukungan pemerintah dalam bentuk pembangunan infrastruktur sangat diperlukan, dan tentunya juga dalam bentuk lain seperti insentif yang merangsang perkembangan pasar di dalam negeri," harap Fadhil Hasan.

Sementara itu, Megain Widjaja, mengatakan, meningkatkan volume transaksi multilateral di bursa berjangka komoditi dalam negeri tidak terlepas dari peran empat pilar. Yakni bursa berjangka, perusahaan pialang, pelaku komoditi atau asosiasi dan pemerintah.

"Sinergi dari empat pilar ini merupakan kunci keberhasilan bursa berjangka sebagai sarana pembentukan harga," tegas Megain.

Di samping itu dijelaskan Megain, garda terdepan dalam meningkatkan likuiditas bursa berjangka tidak terlepas dari perusahaan pialang berjangka. "Oleh karena itu senantiasa diharapkan peningkatan kemampuan perusahaan pialang, baik melalui edukasi maupun sosialisasi."

"Dan disaat yang bersamaan, bursa harus inovatif baik dalam menciptakan kontrak berjangka baru maupun kemudahan transaksi dengan fasilitas sistem perdagangan," papar Megain Widjaja.

Di lain pihak, Made Soekarwo, mengatakan, JFX akan meningkatkan volume transaksi multilateral dengan meluncurkan berbagai kontrak berjangka baru. Sehingga perusahaan pialang mampu memenuhi kewajiban minimum 5 % transaksi kontrak berjangka multilateral.

"JFX dalam waktu dekat akan meluncurkan kontrak berjangka kakao. Di samping itu kami juga sedang mempersiapkan kontrak berjangka komoditi batubara dan kopi," kata Made Soekarwo.

Sementara itu, Kepada Biro Penerimaan Bappebti, Robert J. Bintaryo, mengungkapkan, likuiditas bursa adalah tanggungjawab semua pihak. Penyebab kurang semaraknya transaksi multilateral sering dituduhkan pada tidak likuidnya pasar. "Bagaimana bursa mau likuid kalau perusahaan pialang tidak menawarkan kontrak multilateral kepada nasabah."

"Selain bursa mengeluarkan produk yang kompetitif dan menarik, perusahaan pialang harus mengenalkan produk multilateral kepada nasabah. Kecenderungannya saat ini pemasaran perusahaan pialang lebih mengutamakan berapa besar komisi yang diperoleh dari transaksi nasabah," terang Robert.

"Seharusnya regulasi transaksi multilateral minimal 5 % tidak perlu ada jika semua pihak mau mendorong terbentuknya likuiditas di bursa," kata Robert J. Bintaryo. ▲

Pialang Terbaik 2011 Versi Majalah Investor

Kategori Kinerja Keuangan

1. PT Trijaya Pratama Futures
2. PT Monex Investindo Futures
3. PT Millenium Penata Futures

Kategori Transaksi Multilateral

1. PT Monex Investindo Futures (Kontrak CPO)
2. PT Global Artha Futures (Kontrak CPO)
3. PT Monex Investindo Futures (Kontrak Gold)
4. PT Sinar Mas Futures (CPO)

Kategori Nasabah Terbanyak

1. PT Solid Gold Berjangka

Kategori Pendatang Baru Agresif

1. PT Philip Futures

Sumber: Majalah Investor



Segera Dibentuk Asosiasi Tunggal PBK

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) tengah menyusun cetak biru pembentukan Asosiasi Industri Perdagangan Berjangka Indonesia (AIPBI). Pembentukan AIPBI ini merupakan amanat Undang-undang No. 10/2011, tentang perdagangan berjangka komoditi, pasal 44 A dan 44 B. Ditargetkan AIPBI terbentuk awal tahun 2012.

Kepala Biro Hukum Bappebti, Alfons Samosir, mengatakan upaya awal yang dilakukan ialah menggelar pertemuan para pemangku kepentingan, dan selanjutnya membahas struktur organisasi dan fungsi asosiasi bagi pasar bursa berjangka.

"Untuk mempercepat pembentukan asosiasi tersebut, langkah pertama yang akan dilakukan adalah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Bappebti," jelas Alfons Samosir.

Mengacup pada Undang-undang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 44 A dijabarkan AIPBI merupakan wadah berbadan hukum yang didirikan dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan para anggotanya dan pengembangan industri perdagangan berjangka. Sedangkan pelaku yang wajib menjadi anggota AIPBI adalah setiap pihak yang telah memperoleh izin usaha, izin, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran wajib dari otoritas bursa.

Lebih jauh pada Pasal 44 B dikatakan, ketentuan lebih lanjut mengenai AIPBI diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti. Dan, pendirian, pengurusan, dan atau pembubaran AIPBI dilakukan sesuai dengan ketentuan AD/RT asosiasi dan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pialang Berjangka Indonesia (APBI), I Gede Rakatantra, mengatakan, pihaknya sudah beberapa kali diundang Bappebti bersama Ikatan Perusa-

haan Pedagangan Berjangka Indonesia (IP2BI), untuk membahas pembentukan asosiasi tunggal industri perdagangan berjangka itu.

"Prinsipnya asosiasi tunggal itu nantinya akan lebih banyak berperan dalam edukasi dan pengembangan industri perdagangan berjangka," kata I Gede Rakatantra.

Lebih jauh dikatakan Alfons Samosir, dari beberapa kali pertemuan dengan APBI dan IP2BI sudah ada gambaran asosiasi tunggal yang akan dibentuk.

"Kami sudah membuat chart dan struktur organisasi asosiasi itu. Dengan

dan pengembangan industri perdagangan berjangka Indonesia. Selain itu, dapat mewakili Indonesia dalam konferensi bursa berjangka internasional dan edukasi pelaku bursa berjangka," jelas Alfons.

Di pihak lain, Ketua IP2BI, F. Wishnubroto, mengatakan, menyambut baik pembentukan asosiasi tunggal industri perdagangan berjangka Indonesia itu. "Diundangnya IP2BI dalam pembahasan asosiasi tunggal itu merupakan apresiasi bagi sebanyak 15 anggota perusahaan pedagang."

"Ini berarti kita diberi peran penting untuk mengelola pelaku pasar, seperti self regulatory organization (SRO)," ujar Wishnubroto.

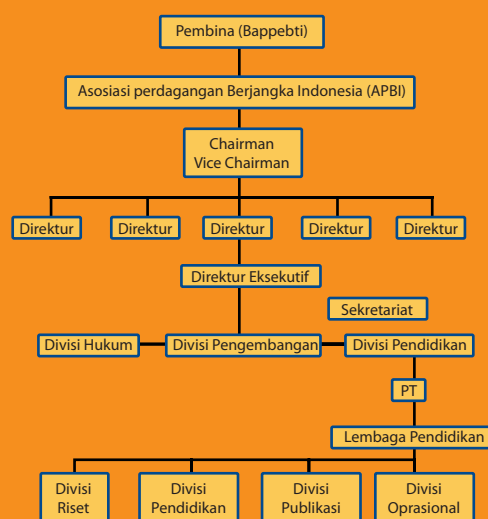
Wishnubroto menggambarkan, dari struktur organisasi yang dicoba dirancang, struktur organisasi asosiasi tersebut akan terdiri dari kepala asosiasi dan direktur eksekutif. Keduanya akan membawahi divisi hukum, pengembangan dan divisi pendidikan.

Divisi pengembangan terbagi menjadi dua bagian yakni bidang komoditas pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Bagian lain ialah bidang komoditas tak berwujud seperti kontrak finansial, suku bunga, emisi carbon dan lainnya.

Sementara itu, menurut Alfons Samosir, pada divisi pendidikan akan dibentuk institut perdagangan berjangka Indonesia atau The Indonesia Futures Trading Institute (IFTI). Lembaga ini nantinya akan sebagai pusat pengkajian dan pelatihan perdagangan berjangka komoditas (P4BK).

"IFTI akan menjadi pusat pengkajian, pengembangan, edukasi dan pelatihan untuk mempercepat perkembangan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia. Nantinya lembaga ini bisa berbentuk perseroan terbatas (PT). Dengan bentuk badan usaha PT, diharapkan IFTI dapat mencari dan memperoleh keuntungan untuk operasional dan pengembangan organisasinya," papar Alfons Samosir. ▲

Struktur Organisasi Asosiasi Perdagangan Berjangka Indonesia



terbentuknya struktur organisasi asosiasi itu akan lebih memudahkan memilih pengurus yang tepat pada asosiasi itu," ujar Alfons.

Menurut Alfons, embrio terbentuknya asosiasi tunggal itu bisa dilakukan dengan APBI dan IP2BI. Melalui penggabungan tersebut, peserta pasar berjangka diharapkan dapat lebih terkoordinasi.

"Asosiasi tunggal itu nantinya jadi partner pemerintah dalam mengawasi

Rame-Rame Bidik Kampus

Salah satu strategi ampuh mengenalkan industri perdagangan berjangka komoditi kepada masyarakat antara lain mendekati dunia pendidikan. Guna mendekati dunia pendidikan atau kalangan kampus, industri perdagangan berjangka komoditi Indonesia berupaya menjalin kerjasama baik dalam bentuk seminar maupun mendirikan galeri bursa berjangka di perguruan tinggi.

Perusahaan pialang berjangka yang agresif melakukan edukasi dan sosialisasi perdagangan berjangka diantaranya PT Fasting Futures. Baru-baru ini, perusahaan pialang yang berbasis di Semarang, Jateng, itu, menggandeng Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) untuk mendirikan galeri bursa berjangka di Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.

Selain itu, perusahaan ini juga bekerjasama dengan Jakarta Futures Exchange (JFX) mendirikan galeri bursa berjangka di Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.

Menurut Dirut PT Fasting Futures, Dewarini Saptaningrum, kerjasama yang dilakukan dengan dunia kampus tersebut merupakan komitmen perusahaan untuk mengenalkan perdagangan berjangka.

"Angkatan kerja di masa mendatang adalah mahasiswa yang saat ini masih menimba ilmu di perguruan tinggi. Jadi sudah sewajarnya mereka mengenal instrumen perdagangan berjangka melalui galeri bursa berjangka yang ada di masing-masing kampus," jelas Dewarini Saptaningrum.

Di samping itu, tambahnya, instrumen perdagangan berjangka merupakan salah satu sektor yang dapat menampung lulusan perguruan tinggi. "Jadi kalau mereka mengenal sejak dini industri perdagangan berjangka komoditi maka dimasa mendatang kita akan mendapatkan SDM yang profesional."

Kerjasama mendirikan galeri bursa berjangka di UKSW ditandai dengan penandatanganan MoU antara BKDI, yang diwakili Dirut BKDI, Megain Widjaja, Rektor UKSW, John A. Titaley dan Dirut PT Fasting Futures, Dewarini Saptaningrum. Kerjasama ini dilaksanakan pada 12 Oktober 2011, di UKSW, Salatiga.

Sementara itu, kerjasama mendirikan galeri bursa berjangka di

Unika Soegijapranata, dilaksanakan pada 3 November 2011, dengan penandatanganan MoU antara

De k a n Fakultas Ekonomi Unika Soegijapranata, Prof. Dr. Andreas Lako, dan disaksikan Rektor Unika, Prof.

Dr.Ir. Y.Budi Widianarko, MSc dengan Direktur JFX, Roy H.M. Sembel, dan Dirut PT Fasting Futures, Dewarini Saptaningrum.

Seminar Emas

Sementara itu, PT Platon Niaga Berjangka, PT Valbury Asia Futures dan PT Megah Tama Berjangka, bekerjasama dengan Universitas Bina Nusantara, menyelenggarakan seminar analisis teknikal investasi emas di bursa berjangka, pada 28 - 29 Oktober 2011. Seminar tersebut mengundang Martin Pring, seorang dosen teknikal analisis yang berkiprah lebih dari 40 tahun dalam bidang pasar berjangka. Martin Pring juga mengajar di beberapa universitas di Amerika Serikat, dan penulis buku yang direkomendasikan Majalah Forbes dan Futures Magazine.

Menurut Dirut PT Platon Niaga Berjangka, Rita Sagita, perusahaannya berkomitmen penuh memberikan layanan terbaik dan bisa dipercaya. Karena itu, perusahaan tidak pernah tanggung-tanggung mendatangkan pelatih teknikal analisis berkelas dunia.

Di pihak lain, Direksi PT Valbury Asia Futures, Sherman R. Krishna, mengatakan, komoditi emas adalah salah satu kontrak berjangka yang ditawarkan bursa berjangka. Investasi komoditi emas tetap bisa memberikan keuntungan sekali pun harga turun. Namun, untuk bisa berpartisipasi dalam pasar berjangka masyarakat harus mengetahui seluk beluk perdagangan derivatif ini, baik peluang maupun resikonya.

"Kami ingin menunjukkan komitmen dalam memajukan industri pasar berjangka di Indonesia. Dengan pembelajaran teknikal analisis ini maka wawasan masyarakat untuk berinvestasi di pasar berjangka bisa menghasilkan keuntungan yang memadai," kata Sherman R. Krishna.▲



Bank Jatim Utamakan SRG

Pembiayaan pasca panen dalam skema sistem resi gudang (SRG) yang dilakukan BPD Jatim, merupakan prioritas utama dalam mendukung petani memperoleh pembiayaan murah. Dengan pembiayaan SRG ini baik petani maupun bank dan pemerintah, sama-sama diuntungkan karena potensi macetnya 0 % dan non performing loan-nya juga 0 %. Di sisi lain, program ini merupakan program yang diprioritaskan pemerintah daerah dalam mensejahterakan petani sekaligus mengembangkan perekonomian Provinsi Jatim.

"Bank Jatim sangat mendukung pembiayaan SRG. Karena semua pihak yang terlibat jelas dan aturannya pun juga jelas, transparan. Tidak seperti program KUT yang terdahulu, semua petani bisa menerima tetapi pengembaliannya macet," demikian antara lain dikatakan Kepala Divisi Kredit Agribisnis dan Ritel, BPD Jatim, M. Salosin, baru-baru ini di Surabaya, Jatim.

Karena potensi macetnya pembiayaan SRG 0 %, maka Bank Jatim menganggap program ini sangat penting untuk didukung, tambah Salosin. Di samping itu, bagi pemerintah daerah program ini digolongkan sebagai program yang dapat meningkatkan perekonomian daerah dan mensejahterakan petani.

"Pemilik saham terbesar Bank Jatim adalah pemerintah daerah, jadi kalau pemilik sudah menetapkan prioritas mengembangkan program ini tentunya kami pun mengikutinya," jelas Salosin.

Menurut Salosin, bukti lain komitmen Bank Jatim mendukung pembiayaan SRG, saat ini telah terbentuk divisi baru yang diberi nama Divisi Kredit Agribisnis dan Ritel. "Nah, SRG masuk dalam divisi ini. Kalau sebelumnya divisi agribisnis ini tidak secara khusus, melainkan digabung pada divisi lain.

Lebih jauh diutarakan Salosin, saat ini ada sebanyak 6 Cabang Bank Jatim yang menyalurkan pembiayaan SRG. Masing-masing cabang di Kab. Banyuwangi, Kraksaan, Nganjuk, Jombang dan Tulungagung. Dari sebanyak 6 cabang tersebut ada sekitar Rp 6,6 miliar komoditi gabah yang dijadikan agunan pinjaman petani.

"Tidak seluruhnya nilai komoditi gabah yang dimasukkan ke gudang oleh petani diajukan sebagai pembiayaan. Hanya sekitar Rp 1,2 miliar. Itu artinya petani hanya menyimpan gabah menunggu harga merangkak naik. Kalau petani membutuhkan pembiayaan, tentunya kredit yang kami kucurkan sekitar 70 % dari nilai komoditi," papar Salosin.

Lebih Cepat

Salosin menambahkan, SRG ini masih merupakan barang baru bagi petani. Belum seluruhnya petani di Jatim yang mengetahuinya. Di masa mendatang

masih sangat diperlukan sosialisasi. "Kalau SRG ini sudah dikenal para petani, kami yakin Bank Jatim akan kewalahan untuk melayani."

"Apalagi kami dapat informasi untuk tahun 2012 mendatang di Jatim akan ditambah gudang SRG. Saat ini sudah ada 5 unit gudang, dan nantinya menjadi 11 unit. Dengan penambahan gudang tersebut, kami pun dari kantor pusat akan mendorong cabang-cabang agar bersinergi dengan Pemda setempat sehingga petani bisa menikmati fasilitas ini," kata Salosin.

Salah satu pentingnya sosialisasi SRG, jelas Salosin, yakni untuk mempercepat proses pencairan pembiayaan. Selama ini masih banyak ditemukan kekurangan dokumen pendukung baik dari petani maupun kelompok tani. Sehingga hal tersebut memperlambat proses pencairan.

"Jika dokumen yang dibutuhkan lengkap pasti akan lebih cepat pencairannya, mungkin hanya hitungan jam karena semua cabang sudah on-line. Saat ini proses pencairan masih memerlukan waktu sekitar 2 hari. Tetapi pasti dimasa mendatang akan kami layani lebih cepat dari yang sekarang," tandas M. Salosin. ▲

Realisasi Pembiayaan SRG Bank Jatim (Periode Oktober 2011)

No. Kabupaten	Komoditi	Plafond	Baki Debet
1. Banyuwangi	Gabah	3.934.000.000	600.000.000
2. Kraksaan	Gabah	589.000.000	-
3. Nganjuk	Gabah	1.032.000.000	171.000.000
4. Jombang	Gabah	987.600.000	425.600.000
5. Tulungagung	Gabah	122.640.000	23.240.000
Total		6.665.740.000	1.219.840.000

*) sumber: Bank Jatim

Bappebti Latih 'Duta' SRG

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dalam meningkatkan kemampuan pelaku sistem resi gudang (SRG) selenggarakan Pelatihan Fasilitator Pendamping SRG, pada 16 - 18 November 2011, di Surabaya, Jatim. Pelatihan ini diikuti sebanyak 11 daerah yang menerima pembangunan gudang SRG tahun 2010 dari Pemerintah Pusat. Masing-masing Kabupaten Pidie Jaya, Serdang Bedagai, Musi Banyuasin, Purwakarta, Lebak, Grobogan, Sumbawa, Palopo, Pinrang, Mamuju dan Masohi.

Kepala Bappebti, Syahrul R. Semurnajaya, yang membuka pelatihan itu, mengatakan, kesempatan mengikuti pelatihan ini harus dimanfaatkan untuk memperkaya pengetahuan dan wawasan para tim pendamping. Terutama dalam implementasi SRG di masing-masing daerah bersangkutan.

"Kami sangat mengharapkan para peserta pelatihan ini bisa maksimal menggali berbagai informasi tentang SRG yang disajikan narasumber. Dengan demikian anda akan menjadi duta SRG di daerah anda," demikian pesan Syahrul ditengah-tengah peserta pelatihan yang diikuti sebanyak 34 peserta itu.

Kami sangat berharap SRG ini dapat berjalan dengan baik dan benar di daerah. Sehingga manfaatnya

sebenarnya dirasakan masyarakat terutama petani. Karena hanya dengan SRG ini petani bisa mengangkat kesejahteraannya melalui peningkatan kualitas dan daya saing komoditi yang dihasilkan.

"Sebab, setiap komoditi yang bisa dimasukkan ke gudang SRG adalah komoditi yang memiliki kualitas sesuai dengan SNI. Jadi kalau komoditi petani sudah sesuai dengan SNI maka pasarnya pun akan terbuka lebar, baik di dalam negeri maupun ekspor," jelas Syahrul

Di tempat terpisah, pada 21 - 24 November 2011, di Jakarta, Bappebti juga melatih pelaku SRG dari daerah yang belum memiliki lembaga sertifikasi uji mutu komoditi. Dengan mengikuti pelatihan tersebut, diharapkan para peserta memiliki kemampuan untuk melakukan uji mutu komoditi yang setara SNI.

Pelatihan ini khusus diselenggarakan Bappebti pada dua daerah yang belum memiliki lembaga uji mutu untuk komoditi kopi di Kab. Gayo, Aceh dan komoditi jagung di Nusa Tenggara Barat. Pelatihan itu dilakukan dengan mengundang narasumber dari Balai Pe-

ngujian Mutu Barang (BPMB), Kementerian Perdagangan.

"Dengan mengikuti pelatihan uji mutu komoditi tersebut, peserta akan diberi sertifikat dari BPMB yang menyatakan orang bersangkutan memiliki kompetensi dalam uji mutu komoditi," demikian dikatakan Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa, Bappebti, Sutiriono Edi.

Kebetulan di dua daerah itu belum ada lembaga uji mutu komoditi, sedangkan di dua daerah tersebut terdapat gudang SRG. Sehingga untuk lebih efisien, kami lakukan pelatihan bagi tenaga pendamping SRG dari daerah itu, tambah Sutiriono.

"Pengujian mutu komoditi sesuai SNI itu merupakan salah satu syarat penting bagi bank dalam meluluskan pembiayaan SRG. Jadi nantinya para peserta ini memiliki kemampuan uji mutu komoditi kopi dan jagung," jelas Sutiriono Edi. ▲



LEMS Lokomotif Kakao Fermentasi Sultra

Sinergi pusat dan daerah kunci keberhasilan lembaga ekonomi pedesaan.



*) Bambang

Pengantar Redaksi; Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu sentra produksi komoditi kakao terbesar di Indonesia. Dari daerah ini sekitar 120.000 ton kakao dihasilkan pertahunnya. Namun, kakao fermentasi yang dihasilkan daerah ini baru sekitar 100 ton per tahun. Hal itu dikarenakan paradigma petani yang cenderung ingin segera menerima uang dari hasil penjualan kakao.

Untuk meningkatkan nilai tambah kakao yang diperoleh petani di wilayah Kendari, Bambang, yang sehari-harinya menjabat Kepala Bidang Perkebunan, Sulawesi Tenggara, sejak tahun 2009 merintis sebuah wadah petani untuk meningkatkan nilai tambah kakao yang dihasilkan. Oleh pria kelahiran Blitar, Jatim, 8 November 1965, ini, wadah tersebut diberi nama Lembaga Ekonomi Masyarakat Sejahtera (LEMS). Kini telah terdapat sebanyak 20 LEMS yang tersebar di 20 desa dari 4 kabupaten.

Biji kakao fermentasi yang dihasilkan LEMS tersebut, memiliki pangsa pasar tersendiri dari salah satu perusahaan pengolahan kakao di dalam negeri. Harga biji kakao fermentasi LEMS yang dibina Bambang, itu, diberi harga premium oleh perusahaan pengolah kakao tersebut. Karena kualitas kakao yang dihasilkan tergolong A1.

Menurut Bambang, yang sehari-harinya menjabat Kepala Bidang Perkebunan, Sulawesi Tenggara, itu,

mengatakan, produktivitas dan volume biji kakao fermentasi yang dihasilkan LEMS, masih bisa ditingkatkan dengan ketersediaan sarana pergudangan yang memadai. Oleh karena itu harapannya, gudang dalam skema sistem resi gudang (SRG) bisa segera terbangun di sentra produksi kakao Kendari.

Untuk meningkatkan kesejahteraan petani kakao Kendari, kelembagaan petani pedesaan itu ke depan akan terus digalakan Bambang. Bagi ayah dari tiga anak ini, upaya yang dilakukannya itu murni pengabdian dan panggilan batin untuk mengangkat derajat petani.

Menggali lebih jauh upaya pria berkumis ini mewadahi petani kakao di Kendari, **Buletin Kontrak Berjangka**, secara khusus mewawancarainya di sela-sela Konsinyering Kajian Pengembangan SRG untuk Komoditi Kakao, yang diselenggarakan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, 28 November 2011, di Jakarta. Berikut ini petikannya.

Tanya (T). Apa yang melatarbelakangi Anda membina petani kakao di Kendari?

Jawab (J). Selama ini cukup banyak program baik yang digagas pemerintah pusat maupun dari daerah untuk meningkatkan kesejahteraan petani khususnya petani kakao seperti di daerah kami. Tetapi berbagai program itu tidak berjalan, dan petani tetap saja tidak sejahtera. Pada hal berbagai program itu didukung dengan pendanaan yang cukup besar baik dari APBN maupun dari APBD. Karena saya sehari-harinya ber-

interaksi dengan para petani kakao itu, maka saya mencoba berpikir langkah apa yang bisa dilakukan meningkatkan kesejahteraan mereka. Yakni, tidak lain meningkatkan nilai tambah komoditi kakao dengan fermentasi. Suatu ketika tahun 2009, saya menemui sejumlah petani kakao di Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. Pada pertemuan itu, saya mengutarakan maksud dan tujuan saya. Ternyata mereka menangkap apa yang saya pikirkan. Maka, biji kakao yang dihasilkan petani itu kami kumpulkan dan difermentasi. Pada dasarnya fermentasi biji kakao itu relatif mudah, alat-alat yang kami gunakan pun ada di sekitar mereka. Meski dengan peralatan yang sederhana, fermentasi biji kakao yang mereka lakukan memiliki kualitas yang prima. Lalu, dengan nilai jual yang lebih tinggi sekitar Rp 5.000 per kg dibandingkan biji kakao gelondongan, disisihkan dana keanggotaan sebesar Rp 1 juta per Kepala Keluarga, dan dana keanggotaan itu bisa dicicil setelah menjual kakao fermentasi. Dari satu desa ada jumlah anggotanya mencapai 300 Kepala Keluarga, jika dikalikan Rp 1 juta maka nilai dana yang terkumpul sudah mencapai Rp 300 juta. Dana yang terkumpul itu dimaksudkan sebagai dana talangan jika ada dari anggota yang membutuhkan uang segera untuk kebutuhan sehari-hari. Dana keanggotaan itu bisa ditingkatkan sesuai dengan kemampuan anggota. Bahkan ada satu Kepala Keluarga yang memiliki dana keanggotaan sebesar Rp

500 juta. 'Nah, disinilah konsep koperasi berjalan, anggota bisa melakukan simpan-pinjam. Uniknya, para petani kakao itu bisa melakukannya semua dengan sendiri. Jadi, pada dasarnya mereka hanya perlu dibimbing dan diarahkan.

[T]. Saat ini sudah ada berapa banyak petani kakao yang Anda bina?

[J]. Konsep yang kami kembangkan terhadap petani kakao ini merupakan lembaga ekonomi pedesaan. Makanya kami beri nama Lembaga Ekonomi Masyarakat Sejahtera (LEMS). Karena LEMS tersebar di sejumlah daerah di Kendari, baik di tingkat kecamatan dan desa maka kata LEMS diikuti dengan kata dari nama daerah bersangkutan. Misalnya LEMS Besulutu. Dengan diikuti kata atau nama daerah yang bersangkutan, akan ada ikatan emosional dari para anggota yang ada didalamnya. Dan yang paling penting lagi, hal itu menonjolkan kerarifan lokal. Karena

dari satu desa dengan desa lain pasti ada perbedaan baik tingkat kemampuan masyarakatnya maupun budayanya. Saat ini telah berdiri sebanyak 20 LEMS yang tersebar di 20 desa dari Kabupaten

Kolaka, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Bombana.

[T]. Mengapa diberi nama Lembaga Ekonomi Masyarakat Sejahtera?

[J]. Jujur, nama ini sengaja kami ciptakan agar lebih bersifat umum, sehingga siapa pun bisa bergabung dan pihak mana pun bisa memberi dukungan. Kalau diberi nama kelompok tani atau koperasi, sangat sektoral. Sudah menjadi rahasia umum, kalau kelompok tani berarti binaan dari sektor pertanian, sehingga dukungan dari pihak lain akan sulit didapatkan. Begitu juga jika dimulai dengan nama koperasi, konotasinya akan macam-macam. Jadi pemberian nama Lembaga Ekonomi Masyarakat Sejahtera lebih kepada psikologis masyarakat saja.

[T]. Dari sebanyak 20 LEMS tersebut, sudah berapa besar dana petani kakao yang terkumpul?

[J]. Persisnya jumlah dana anggota LEMS itu saya tidak ikuti, karena setiap saat berubah sesuai penambahan dana anggota. Tetapi beberapa waktu lalu saya peroleh informasi sudah lebih dari Rp 3 miliar.

[T]. Apa tantangan terberat saat Anda merintis LEMS?

[J]. Kalau yang bersifat fisik itu sudah sering, dan bagi saya hal itu tidak masalah. Karena ada saja ancaman fisik datang dari kaki tangan tengkulak yang merasa lahan usahanya terganggu. Tantangan yang terberat adalah bagaimana meyakinkan para petani itu, dan mengarahkan mereka untuk melakukan fermentasi. Jika mereka hanya menjual kakao gelondongan, nilai jual biji kakao sangat rendah dan para tengkulak itu menghargainya seandainya saja. Oleh karena itu harapan kami jumlah LEMS ini terus bertambah. Tahun 2012 kami targetkan mencapai lebih 30 LEMS. Hanya dengan penguatan kelembagaan ekonomi pedesaan seperti LEMS ini para petani kakao di Kendari bisa melawan cengkaman para tengkulak.

[T]. Setelah LEMS berjalan sekitar 3 tahun ini, dukungan apa yang diperoleh?

[J]. Selain kami mendapatkan pasar yang sudah pasti dari perusahaan pengolahan biji kakao, dukungan sudah mulai muncul dari berbagai instansi. Seperti dari Bank Indonesia yang mem-

beri pelatihan manajemen bagi pengurus LEMS. Ada juga sejumlah perusahaan yang memberi bantuan seperti pupuk dan bibit kakao. Dengan dukungan seperti itu, petani lebih semangat menghasilkan biji kakao fermentasi dan meningkatkan produksi tanaman kakao.

[T]. Apa rencana strategis yang akan Anda lakukan di tahun 2012 mendatang?

[J]. Langkah pertama adalah membentuk LEMS di tingkat Provinsi Kendari, dan saat ini sedang proses penyusunan AD/RT. LEMS tingkat provinsi ini akan menjadi pusat koordinasi dan satu komando. Dengan demikian lebih mudah untuk mengontrol berbagai kegiatan dan kapasitas biji kakao fermentasi yang siap dipasarkan. Kelak LEMS tingkat provinsi sudah terbentuk, kami akan mendirikan perusahaan yang menjadi mediator baik untuk perdagangan maupun pengembangan usaha. Selain itu, kami akan kerjasama dengan Balai Penelitian Kakao dan Kopi, Jember, untuk memperoleh sertifikasi kualitas sekaligus grading biji kakao. Ini pun satu langkah yang signifikan untuk meningkatkan nilai jual biji kakao fermentasi. Karena, dengan sertifikasi akan mendapatkan pengakuan dari pasar sehingga harga jualnya bisa lebih tinggi. Jadi kalau sudah mendapat sertifikasi, kami pun akan melakukan labelisasi biji kakao fermentasi yang bisa dipasarkan langsung baik untuk pasar domestik maupun tujuan ekspor.

[T]. Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan utilitas biji kakao fermentasi?

[J]. Saat ini kami baru bisa menghasilkan kakao fermentasi sekitar 10 ton per bulan. Dengan produksi sebesar itu, biji kakao tersebar disekeliling rumah-rumah petani. Oleh karena itu kami akan mengupayakan pembangunan gudang yang sekaligus tempat fermentasi di tingkat kabupaten. Sejalan dengan itu, kami akan mengajukan kepada Kementerian Perdagangan untuk membangun gudang dalam skema Sistem Resi Gudang di pelabuhan Kota Kendari atau di Kota Konawe. Jika ada gudang kakao yang tersentralisasi di tingkat provinsi, kami cukup optimis bisa menghasilkan lebih besar lagi biji kakao fermentasi. Saat ini Indonesia masih impor sekitar 40.000 ton kakao fermentasi. Pada hal, Sulawesi Tenggara bisa menghasilkan sekitar 120.000 ton kakao. Kalau nantinya kakao Sulawesi Tenggara semuanya sudah difermentasi, tentunya Indonesia tidak perlu impor lagi. ▲



Agenda Foto



Majalah Investor memberikan penghargaan Investor Awards 2011 kepada Tujuh Perusahaan Pialang Berjangka Komoditi terbaik tahun 2011. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Sekjen Kemendag Ardiansyah Parman yang mewakili Mendag dan Kepala Bappebti Syahrul R Sempurnajaya. Acara tersebut dihadiri Pejabat Eselon II Bappebti, Direksi JFX, Direksi ICDX, Ketua APBI, Ketua IP2BI, dan sejumlah direksi perusahaan pialang. 24 November 2011, Jakarta.



Kepala Bappebti, Syahrul R Sempurnajaya memberi arahan pada penyelenggaraan Penataan dan Penyegaran Wakil Pialang Berjangka. Acara tersebut dihadiri oleh Pejabat Eselon II dilingkungan Bappebti, Direksi JFX, ICDX, ISI, KBI, BAKTI dan undangan lainnya. 29-30 November 2011 di kota Bandung, Jawa Barat



Kepala Bappebti, Syahrul R Sempurnajaya memberi sambutan pada penyelenggaraan seminar nasional perdagangan berjangka komoditi untuk pelaku usaha, aparaturnegag hukum dan kalangan kampus di Surabaya Jawa Timur. Dalam kunjungan dua hari di Surabaya, Kepala Bappebti juga melakukan dialog interaktif perdagangan berjangka di media elektronik yakni TV Surabaya dan Radio Delta FM. Disamping itu Kepala Bappebti juga memberi arahan pada pelatihan tenaga pendamping SRG. 15-16 November 2011 Surabaya, Jawa Timur.





Agenda Foto

Bappebti bekerjasama dengan Pusdik Reskrim Polri menyelenggarakan Penyegaran Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dibuka langsung oleh Kepala Bappebti Syahrul R Sempurnajaya di Hotel Lorin Sentul, Bogor. Kepala Bappebti dalam arahannya dikatakan UU No. 10/2011 tentang Perubahan UU No. 32/1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi ini didasarkan pada dua fondasi pokok yaitu pengembangan (development) dan Pengawasan (control and surveillance). Dalam hal pengawasan Bappebti harus membuat program pengembangan secara simultan dengan program pengawasan, PPNS merupakan garda terdepan yang mengawal pelaksanaan UU No. 10/2011 ini. Disamping itu, dalam rangka law enforcement yang tidak kalah pentingnya bahwa PPNS harus menguasai ketentuan di bidang perdagangan berjangka, khususnya UU No. 10/2011 yang baru. 24 November 2011 Bogor, Jawa Barat.



Kepala Bappebti yang diwakili Kepala Biro Analisis Pasar Bappebti, Ismadjaja Toengkagie memberikan sambutan sekaligus membuka acara Pertemuan Teknis Sistem Aplikasi Pelaporan Keuangan Pialang Berjangka. Dalam sambutannya Kepala Bappebti mengatakan acara pertemuan teknis tersebut bertujuan untuk melakukan sosialisasi dan uji coba sistem aplikasi pelaporan keuangan pialang berjangka sehingga penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulan dan tahunan dapat dilakukan secara elektronik untuk mempercepat dan mempermudah penyampaian laporan keuangan. 21 November 2011 Jakarta.

Kepala Bappebti Syahrul R Sempurnajaya, menjadi salah satu narasumber pada dialog interaktif perdagangan berjangka di media elektronik Semarang. Sementara itu, Sekretaris Bappebti, Nizarli mewakili Kepala Bappebti, memberikan pengarahan pada acara Sosialisasi Perdagangan Berjangka Komoditi di Semarang, Jawa Tengah. Dalam arahannya, sosialisasi itu ditujukan mensosialisasikan Undang-undang No. 10 Tahun 2011 (Perubahan Atas Undang-Undang No.32 Tahun 1997) Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan sekaligus memperkenalkan manfaat dan resiko Perdagangan Berjangka Komoditi kepada para pelaku usaha komoditi. 9-10 November 2011 Semarang, Jawa Tengah.



Luncurkan Olein BKDI Menuju *Palm Oil Complex*

Bursa Komoditas dan Derivatif Indonesia (BKDI) pada bulan Desember 2011, nanti, bakal menambah produk multilateral. Yakni kontrak berjangka komoditi minyak goreng atau olein. Diperdagangkannya kontrak berjangka olein untuk memperkuat kontrak berjangka CPO yang telah terlebih dahulu diperdagangkan BKDI.

"Kami sudah mengajukan ijin ke Bappebti untuk memperdagangkan kontrak berjangka olein. Dengan diperdagangkan kontrak berjangka olein itu, BKDI akan menuju bursa berjangka yang disebut palm oil complex. Artinya, bursa yang memperdagangkan sejumlah komoditi turunan dari CPO," demikian antara lain dikatakan Direktur Utama BKDI Megain Wijaya.

Lebih jauh diutarakan Megain, rencana memperdagangkan kontrak berjangka olein sudah diajukan ke Bappebti sejak pertengahan tahun lalu. Hal itu dilatarbelakangi permintaan pelaku industri kelapa sawit dan pihak pemerintah sendiri.

"Potensi memperdagangkan kontrak berjangka olein ini cukup besar, karena baru Indonesia di dunia yang memperdagangkan kontrak olein. Jadi peluang ini harus ditangkap. Karena kita semua tahu komoditi olein merupakan salah satu komoditi pangan yang dikonsumsi di sejumlah negara-negara Asia, Afrika dan Eropa," jelas Megain Widjaja.

Di samping itu, tambahnya, dengan volume transaksi CPOTR yang mulai ramai setelah dijadikan salah satu patokan harga Bea Keluar CPO, para pelaku pasar atau industri industri kelapa sawit juga membutuhkan perlindungan atau

manajemen risiko harga.

Menurut rencana, kontrak berjangka olein akan diperdagangkan BKDI menggunakan mata uang rupiah dengan ukuran 10 ton per 1 lot. Sedangkan lokasi serah terima fisik akan dilakukan di gudang atau pelabuhan di wilayah Jakarta dan Surabaya.

Sementara itu, Kepala Bappebti, Syahrul R. Sempurnajaya, mengatakan, pemerintah akan rencana BKDI memperdagangkan kontrak berjangka olein.

"Kami akan mendorong bursa berjangka untuk memperdagangkan kontrak berjangka multilateral. Karena pemerintah menginginkan bursa berjangka sebagai sarana pembentukan harga dan lindung nilai," tegas Syahrul.

Ditambahkan Syahrul, perluncuran kontrak berjangka olein akan meningkatkan transaksi multilateral di bursa komoditas domestik. ▲

Transaksi PLAN dan Multilateral BKDI Melejit

Pengaluran Amanat ke Luar Negeri (PALN) melalui Bursa Komoditas dan Derivatif Indonesia (BKDI) terus mengalami peningkatan. Pada periode Oktober 2011, volume transaksi total PALN mencapai 213 lot atau mengalami peningkatan sekitar 25 % dibandingkan periode bulan September 2011 yang tercatat sebesar 171 lot.

Dengan pencapaian volume transaksi PALN itu, target BKDI hingga akhir tahun 2011 sebesar 800 lot sudah mendekati target, demikian antara lain dikatakan Direktur BKDI, Arwadi J Setiabudi, dalam sebuah kesempatan awal bulan November 2011, lalu.

"Jadi sampai bulan Oktober 2011, transaksi PLAN yang mulai ditransaksikan sejak April sudah mencapai 97 % dari target kami sebesar 800 lot sepanjang tahun 2011. Besar kemungkinan transaksi PALN itu akan melampaui target kami. Karena masih ada sekitar 2 bulan lagi hingga akhir tahun," jelas Arwadi.

Sementara itu, volume transaksi multilateral BKDI sepanjang Oktober 2011 juga mengalami peningkatan sebesar 16,1 %, menjadi 95.000 lot. Sedangkan pada periode September 2011, hanya tercatat sebesar 81.848 lot.

Dari transaksi multilateral BKDI sebesar 95.000 lot itu, kontrak berjangka CPO berkontribusi sekitar 96 % atau sebanyak 91.207 lot. Angka tersebut bertambah 19,28% dari volume tran-

saksi CPOTR di bulan sebelumnya sebesar 76.462 lot.

Sedangkan kontrak berjangka emas yakni GOLDGR dan GOLDID, masing-masing volume transaksinya sebesar 808 lot dan 217 lot atau berkontribusi 0,85 % dan 0,22 % dari total volume transaksi di bulan Oktober. Kemudian produk GOLDUD, kontrak emas berdenominasi dollar AS pada bulan kesembilan kemarin mencetak volume transaksi 2.768 lot atau berkontribusi sebesar 2,91 %.

Menurut Arwadi, kenaikan volume transaksi BKDI tersebut transaksi didorong upaya edukasi dan sosialisasi yang dilakukan BKDI baik kepada pelaku pasar maupun masyarakat calon investor. ▲



Indonesia Negara Ketiga Atur Transaksi OTC

Krisis keuangan di tahun 2008 yang melanda sejumlah negara akibat aksi spekulasi dalam transaksi over the counter (OTC), mendorong negara-negara yang tergabung dalam G-20 pada pertemuan di Pittsburgh tahun 2009, untuk memperketat dan mengatur transaksi OTC terhadap produk-produk keuangan. Pada hal, sebelumnya sejumlah otoritas perdagangan berjangka dari negara-negara maju merasa sulit untuk melakukan pengatiran dan pengawasan terhadap transaksi tersebut.

Indonesia sudah mulai melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap transaksi OTC, atau yang dikenal dengan transaksi Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) sejak tahun 2005. Jadi Indonesia sudah lebih jauh melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap transaksi SPA dibandingkan dengan negara-negara

lain yang tergabung di G-20, demikian antara lain diutarakan Sekjen Kementerian Perdagangan, Ardiansyah Parman, disela-sela penganugerahan pialang terbaik versi Majalah Investor, di Jakarta, 23 November 2011.

"Memang pengaturan transaksi SPA yang dilakukan pada tahun 2005, itu, masih dalam skala Surat Keputusan Kepala Bappebti. Tetapi itu sudah jauh lebih baik dibandingkan tidak diatur sama sekali dan pada akhirnya meresahkan masyarakat," jelas Ardiansyah.

Dan kini, tambah Ardiansyah Parman, yang juga pernah menjabat Kepala Bappebti, itu, mengatakan, pengaturan transaksi OTC atau SPA sudah ditingkatkan menjadi undang-undang sejalan dengan amandemen Undang-undang No. 32/1997, tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menjadi Undang-undang No.10/2011.

"Jadi, Indonesia termasuk negara yang lebih dahulu mengatur perdagangan OTC di antara negara-negara G-20.

Kalau berdasarkan undang-undang di masing-masing negara, Indonesia yang ketiga setelah Amerika Serikat dan Jepang," papar Ardiansyah.

"Dengan ditingkatkan pengaturan dan pengawasan transaksi OTC itu, Indonesia di masa mendatang akan menjadi salah satu pasar potensial transaksi produk-produk keuangan. Tetapi tetap harus diingat dan diperhatikan, bahwa peran bursa berjangka merupakan sarana pembentukan harga dan lindung nilai dari sejumlah komoditi," jelasnya.

Bursa berjangka sangat penting bagi posisi Indonesia yang merupakan negara produsen dari sejumlah komoditi primer dunia. Oleh karena itu, pemerintah akan terus mendorong pembentukan harga komoditi di dalam negeri melalui bursa berjangka, imbuh Ardiansyah Parman. ▲

Ekspor Dihentikan Rotan Masuk SRG

Pemerintah akan menggunakan sistem resi gudang (SRG) untuk menyerap rotan petani, jika ekspor komoditas itu dihentikan. Dengan demikian petani maupun pedagang pengumpul rotan tetap mempunyai jaminan usaha. Kebijakan pemerintah menghentikan ekspor rotan didasari untuk peningkatan daya saing dan industrialisasi rotan di dalam negeri.

Demikian antara lain dijelaskan Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan, saat melakukan kunjungan ke industri rotan di Cirebon, Jabar, 28 Oktober 2011. Kunjungan diindustri rotan itu juga dihadiri Menteri Perindustrian M.S Hidayat, Menteri Kehutanan,

Zulkifli Hasan. Turut hadir dalam kunjungan itu Gubernur Sulawesi Barat, Anwar Adnan Saleh, sejumlah Anggota Komisi VI DPR-RI, dan sejumlah pejabat dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kehutanan. Sementara itu, Bupati Cirebon, Dedi Supardi, dan pengusaha rotan juga hadir dalam kunjungan tersebut.

"Pemerintah akan melakukan sikap dan tindakan untuk meningkatkan daya saing, juga industrialisasi rotan di dalam negeri. Terutama di sentra produksi rotan seperti di Cirebon dan di Sulawesi barat," jelas Gita Wirjawan.

Untuk menghindari kerugian di tingkat petani, pemerintah akan mengarahkan komoditi rotan masuk dalam SRG. Memang saat ini komoditi rotan belum merupakan komoditi yang diatur dalam

SRG. Oleh karena itu dalam waktu dekat akan diatur dan dilengkapi mekanisme rotan masuk dalam skema SRG, tambah Gita.

Sementara itu di tempat yang sama, Menteri Perindustrian, M.S. Hidayat, mengatakan, Kementerian Perindustrian akan bertekad untuk membangkitkan kembali industri rotan di dalam negeri, khususnya di sentra penghasil rotan Cirebon dan juga di sentra-sentra industri dan penghasil rotan di Indonesia.

"Kita harapkan dalam tiga tahun ke depan industri rotan di dalam negeri akan bangkit dan menggairahkan sektor perdagangan khususnya pasar domestik," jelas M.S Hidayat. ▲



Cuaca Buruk Harga Rumput Laut Ambruk

Harga rumput laut di beberapa wilayah sentra produksi mengalami penurunan. Harga rumput laut jenis cottoni berada dikisaran Rp 7.000 - Rp 8.000 per Kg, turun sekitar Rp 2.000 per Kg dari sebelumnya. Sedangkan rumput laut jenis gracillaria berada pada level Rp 4.000 - Rp 6.000 per Kg.

Berdasarkan data yang dihimpun, penurunan harga rumput laut yang terjadi di Provinsi Maluku, antara lain

diakibatkan cuaca buruk. Hal itu pada akhirnya berdampak penurunan kualitas.

Dalam kaitan itu, Pemda setempat akan mengusahakan pengembangan industri pengolahan, agar petani tidak terus-menerus ekspor dalam bentuk bahan mentah. Di sisi lain, akan memfasilitasi petani rumput laut alat pengering, sehingga tidak bergantung pada penjemuran matahari yang kurang maksimal di musim penghujan.

Sementara itu, harga rumput laut di tingkat petani pembudidaya di Kabu-

paten Lampung Timur, masih relatif stabil dikisaran Rp 8.000 - Rp 10.000 per Kg. Stabilitasnya harga ini disebabkan tidak ada peningkatan permintaan konsumen atau pedagang besar.

Pasar rumput laut di Kabupaten Lampung Timur sebagian besar dipasok luar daerah untuk memenuhi kebutuhan konsumen daerah itu. Rumput laut didatangkan dari Kecamatan Ketapang Lampung Selatan, yang juga dikenal sebagai salah satu sentra budi daya terbesar di Lampung. Daerah sentra rumput laut ini berjarak sekitar 80 kilometer dari Lampung Timur. ▲

Musim Dingin Bikin Harga Kopi Menghangat

Kontrak berjangka komoditi kopi ditransaksikan naik ke level tertinggi diakhir bulan November 2011. Naiknya harga

kopi itu dipicu pembelian dari para pengolahan kopi yang mengantisipasi peningkatan permintaan dari Amerika sebagai konsumen terbesar dunia akan produk kopi. Presiden, JPS Commodities, Joe Scaduto, mengatakan permintaan kopi biasanya beranjak naik sebelum musim dingin di belahan bumi utara, dan meningkatkan penjualan selama liburan di akhir tahun.

"Sekarang adalah waktu pemangangan puncak tahun ini, dan penyangrai dapat mendukung pasar," kata Scaduto.

Pada satu sesi perdagangan di ICE Futures AS di New York, harga kopi Arabika untuk pengiriman bulan Maret mengalami kenaikan sebesar 3,7 % menjadi US\$ 2,427 per pound (1 pound setara 0,45 kg).

"Itu merupakan kenaikan terbesar untuk kontrak teraktif komoditi kopi sejak bulan Oktober lalu," terang Scaduto.

Analisis Newedge Group di New York, Marcio Bernardo, mengatakan Brasil sebagai produsen kopi saat ini sedang keluar dari pasar untuk menyongsong musim liburan akhir tahun, dan itu sebabnya tidak terdapat banyak penjualan. Sisi lain, cuaca yang belum mendukung yang saat ini terjadi di Brazil turut menghambat tanaman petani kopi. Akibatnya harga komoditas ini telah naik 6,9 % selama November 2011. ▲

Harga CPO diperkirakan US\$ 3.300 tahun depan

Cruude Palm Oil (CPO) mulai menggeliat di pasar berjangka. Nilai kontrak pengiriman CPO untuk Januari 2012, ditutup naik 0,5 % menjadi RM 3.135 per ton pada sebuah sesi pertengahan November lalu. Melihat pergerakan harga itu, pelaku pasar optimistis harga CPO akan menanjak hingga tahun depan.

Direktur Godrej International Limited, Dorab Mistry, salah satu broker besar di India, memprediksi harga CPO di bursa berjangka Malaysia mampu mencapai RM 3.300, pada Januari 2012. Penyebabnya, ketidakseimbangan antara sisi permintaan dan penawaran CPO di pasar.

Laju pertumbuhan Produksi minyak sawit mentah diperkirakan melambat.

Namun, di saat yang sama, permintaan masih terus tumbuh. Alhasil, harga pun berpotensi terkerek naik. Bahkan, perhitungan Dorab, pertengahan tahun 2012, CPO bisa melambung ke level US\$ 4.000 atau setara US\$ 1.277 per metrik ton. Ini akan menjadi harga tertinggi CPO sejak tahun 2008.

Para produsen CPO terbesar di dunia seperti Indonesia dan Malaysia, kemungkinan menurun angka produksinya. Dorab memperkirakan, tahun ini produksi minyak sawit dari seluruh perkebunan di Indonesia hanya 25,2 juta ton. Angka itu lebih kecil dari proyeksi semula, yaitu 25,5 juta ton.

Adapun Malaysia juga diprediksi hanya mampu memproduksi 18,8 juta ton kelapa sawit. Pertumbuhan produksi kelapa sawit global tahun ini diperkirakan hanya sebesar 5,5 juta ton. "Permintaan minyak nabati tahun 2011-2012 akan di atas enam juta ton," kata Dorab. Pelambatan produksi CPO akibat banyak pohon yang memasuki usia tua. Faktor lain yang bisa menghambat produksi CPO adalah kondisi cuaca yang tidak menentu. Ada ramalan, negara produsen CPO akan dilanda banjir. ▲

Harga Karet Terus Alami Penurunan Harga

Kontrak berjangka komoditi karet di Tokyo Commodity Exchange (TOCOM), ditransaksikan masih dalam posisi yang lemah. Dari sesi perdagangan yang dikutip pada akhir November lalu untuk penyerahan bulan April, ditutup melemah sebesar 3,7 % atau berada pada level harga 263,5 Yen per Kg. Penurunan harga karet itu terkait melemahnya permintaan dari China selaku negara importir terbesar.

Penurunan harga karet juga terjadi di dalam negeri. Harga getah karet di tingkat petani di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, terus me-

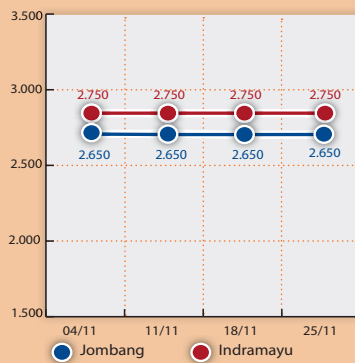
lemah akibat mulai tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir di daerah itu. Harga karet turun dari Rp 6.000 menjadi Rp 5.000 per kilogram karena curah hujan yang mengakibatkan kadar air sangat tinggi.

Di Kabupaten Landak, harga Karet juga mengalami penurunan. Harga karet saat ini berada pada level harga Rp 8.000 sampai Rp 10.000 per kilogram. Sebelumnya mencapai Rp12.000 hingga Rp 20.000 per kilogram.

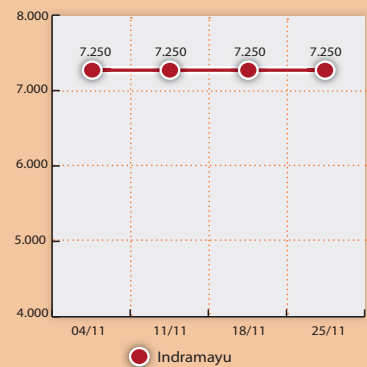
Untuk mengatasi tren penurunan harga itu, International Tripartite Rubber Council (ITRC) yang terdiri dari Thailand, Malaysia dan Indonesia berencana membuat daftar hitam bagi pembeli yang membatalkan atau menunda pesanan. ▲

Harga Komoditi (Rp/Kg)

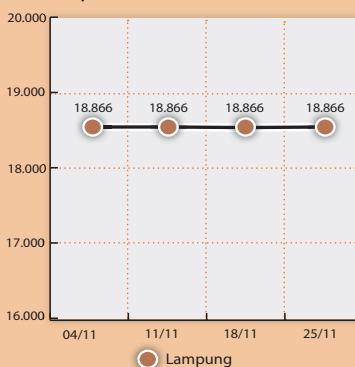
Gabah IR64



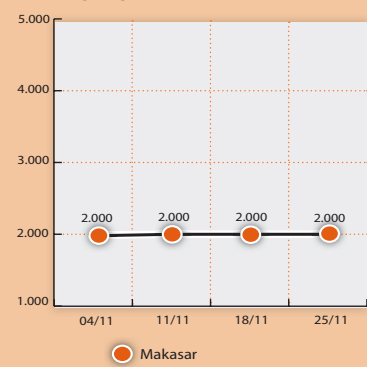
Beras IR64



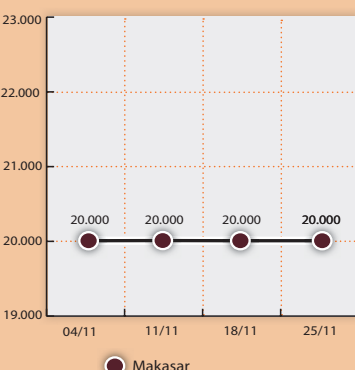
Kopi



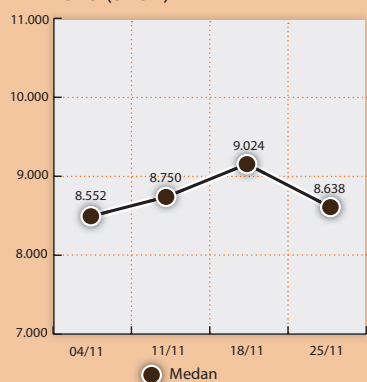
Jagung Basah



Kakao



CPO (SPOT)



Gunakan Kencur Penyakit Lacur

Kencur- *Kaempferia galanga* L. adalah salah satu jenis empon-empon atau tanaman obat yang tergolong dalam suku temu-temuan- *Zingiberaceae*. Mendengar kata Kencur, agaknya semua masyarakat Indonesia sudah sangat sering. Tetapi apa khasiat dan bentuk dari tanaman Kencur mungkin belum semua diantara kita yang mengetahuinya.

Saat dibangun Sekolah Dasar, kita cukup sering mendengar pribahasa yang berbunyi 'anak bau kencur' yang artinya anak yang belum berpengalaman. Namun, dibalik tersusunnya kata-kata pribahasa itu, terdapat sejumlah makna dari sebuah budaya tradisional yang menggunakan Kencur sebagai bahan alternatif perlindungan bagi tubuh anak-anak.

Digunakannya Kencur oleh masyarakat sebagai bahan alternatif perlindungan tubuh anak-anak untuk memberi rasa nyaman dan kehangatan. Tidak hanya untuk anak-anak, bahkan orang dewasa pun sungguh banyak yang memanfaatkan khasiat Kencur. Mulai dari alasan kecantikan hingga menjaga kebugaran tubuh.

Nama Kencur yang sering didekat masyarakat Indonesia, itu, pada dasarnya diambil dari bahasa San-

skerta, Kachora. Kata itu berarti temu putih- curcuma zedoaria. Sedangkan diberbagai daerah Kencur dikenal dengan nama cikur (bahasa Sunda), ceuko (Aceh), kaciwer

Karo] kencor (Madura), cekuh (Bali), serta cekir (Sumba).

Beberapa penelitian mengungkapkan Kencur kemungkinan berasal dari India. Di negara ini Kencur tersebar luas dimana-mana. Tanaman ini dibudidayakan secara meluas di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Cina hingga kemungkinan pula diintroduksi ke Australia.

Khasiat dari tanaman Kencur ini sudah menjadi bahan penelitian dari berbagai ilmuwan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dari berbagai penelitian itu, disimpulkan rimpang atau rizoma tanaman Kencur mengandung minyak atsiri dan alkaloid yang dimanfaatkan sebagai stimulan.

Minyak atsiri tanaman Kencur mencapai 2,4 % - 3,9 %, minyak atsiri ini mempunyai aktivitas anti bakteri terhadap *staphylococcus aureus* dan *escherichia coli*. Selain itu dari tanaman ini terdapat cinnamal, aldehide, asam mitil p-cumarik, asam cinnamal, etil ester dan pentadekan. Dalam literatur lain disebutkan pula bahwa rimpang Kencur mengandung sineol, paraumarin, asam anisic, gom, pati 4,14 % dan mineral 13,73 %

Kencur merupakan temu kecil yang

tumbuh subur di daerah dataran rendah atau pegunungan yang tanahnya gembur dan tidak terlalu banyak air. Jumlah helaian daun kencur tidak lebih dari 2-3 lembar (jarang 5) dengan susunan berhadapan, tumbuh menggeletak di atas permukaan tanah. Bunga majemuk tersusun setengah duduk dengan kuntum bunga berjumlah antara 4 sampai 12 buah, bibir bunga (labellum) berwarna lembayung dengan warna putih lebih dominan. Tumbuhan ini tumbuh baik pada musim penghujan. Kencur dapat ditanam dalam pot atau di kebun yang cukup sinar matahari, tidak terlalu basah dan setengah ternaungi.

Sebagai tanaman obat, Kencur memberikan manfaat cukup banyak terutama rimpangnya. Kencur berkhasiat untuk obat batuk, gatal-gatal pada tenggorokan, perut kembung, mual, masuk angin, pegal-pegal, pengompresan bengkak, tetanus dan penambah nafsu makan.

Beras Kencur (campuran tepung beras dan Kencur yang dibuat ramuan) merupakan obat tradisional yang telah dikenal umumnya untuk obat bengkak dan encok. Ramuan kencur juga berfungsi merangsang pertumbuhan bulu alis dan mata jika dioleskan sebagai bedak. Kencur juga digunakan untuk membuat ragi dan zat warna. Akhir-akhir ini kencur digunakan untuk industri kembang gula dan industri kosmetik dalam negeri. ▲



Menjaga Kebugaran Tubuh

Manfaat tanaman Kencur sebagai tanaman herbal berkhasiat sudah tidak terbantahkan lagi. Dikonsumsi secara rutin, Kencur berguna memperkuat ketahanan tubuh dan pada akhirnya menjaga kesehatan. Berdasar analisis, disebutkan bahwa minyak atsiri yang terkandung dalam rimpang Kencur mengandung kurang lebih 23 macam senyawa yang bisa bermanfaat bagi tubuh. Kencur bisa membantu menjaga kebugaran tubuh dan juga masih ada beberapa manfaat lain lagi. Berikut ini manfaat Kencur, di antaranya;

Pelangsing Tubuh

Caranya : Seduh 1 rimpang kencur, 1 sendok teh tepung beras dan 1 potong gula kelapa dengan segelas air panas. Diamkan beberapa saat, setelah dingin saring dan minum 3 kali sehari.

Mengobati Migrain

Caranya : Lumatkan sepotong kencur sebesar jari, 3 cm jahe, 3 cm lempuyang, 1/2 sendok teh adas dan 5 cm pulasari sambil di tambahkan 6 sendok makan air. Peras dan tambahkan sedikit madu, minum 3 kali sehari masing-masing 2 sendok makan.

Mengobati Asma

Caranya : Parut rimpang kencur secukupnya dan peras airnya, kemudian campur air kencur dengan 2 sendok makan madu dan satu kuning telur ayam kampung. Campur hingga rata, diamkan beberapa saat kemudian minum.

Mengobati rematik

Caranya : Potong - potong 1 ons kencur, 1/2 ons jahe dan campur dengan 1 ons beras yang sudah di gerus beserta 1 ons biji kedawung. Kemudian rebus bahan tersebut dengan 2 gelas air hingga tersisa setengahnya. Setelah dingin tambahkan air perasan jeruk nipis (1/2 buah saja) dan 2 sendok teh madu. Selanjutnya minum 2 kali sehari masing-masing setengah gelas.

Mengobati Tetanus

Caranya : Rebus 3 jari rimpang kencur dan setengah genggam daun jinten dengan 3 gelas air, tambahkan 3 jari gula enau. Rebus hingga airnya tersisa setengahnya. Setelah dingin minum 2 kali sehari.

Mengobati Muntah masuk Angin

Caranya : Kunyah 1,5 jari rimpang kencur bersama sedikit garam, setelah halus telan kungkahan kencur tersebut bersama air hangat. Lakukan 2 kali sehari.

Mengobati Batuk

Caranya : Parut 3 potong kencur sebesar jari dan masukkan ke dalam setengah gelas air yang sudah di beri garam secukupnya, aduk dan peras dengan kain. Selanjutnya minum setiap pagi dan sore masing-masing satu resep.

Mengobati Jerawat

Caranya : Lumatkan sepotong kencur sebesar jari, sepotong temulawak sebesar jari, 5 butir jinten, bersama sejumput asam kawak dan gula aren. Kemudian seduh dengan segelas air panas, selagi hangat saring dan beri sedikit air jeruk nipis. Minum pada pagi hari. ▲

Produk Jamu Sari Bumi Kencur
Jamu Gendong Beras Kencur
(wanita dan lelaki)
- Pecah Angin dalam urat
- Melancarkan perjalanan darah
- lenguh - lenguh sendi
- sakit pinggang/sehat badan
2x sehari pagi dan malam 1
gelas kecil
Sila layari laman web kami
di

Damping rates plummeted rattan will join warehouse receipt system

Government will use warehouse receipt system to absorb rattan if the export of this commodity is stopped. Thus farmer or rattan collector trader will still have business assurance. Further more in long term a buffer agency will be established to absorb domestic rattan supply.

That was one of topics that was presented by Trading Ministry Gita Wirjawan, during his visit to rattan industry central in Cirebon, East Java, on the 28th of October 2011. On that visit, Forestry Ministry Zulkifli Hasan, Industrial Ministry M.S. Hidayat and some official staff from those three Ministry were also attending. The 3

Ministries visits was also attended by West Sulaver Governor, Anwar Adnan Saleh and also 4th Commission of The Indonesian House of representatives, Cirebon Governor, Dedi Supardi, Chief Governor of Cirebon, district regional secretary and rattan businessman association.

"The absorption of rattan raw materials will be using warehouse receipt system and we will make rules on classification, quality and price. The Warehouse receipt system will prevent the lost from rattan collector who claim they are worried that after rattan export embargo, the local rattan price will low." Gita said.

He also said that it will be possible to use more warehouses like the ones in Sulawesi to accommodate local rattan

raw material.

More over Gita Wirjawan explained, in long term they will establish a buffer agency to absorb domestic rattan supply. "It is still long term plan as it's involved so many aspects such as country budget allocation."

Government policy in forbidding rattan export was purely to increase the productivity of domestic rattan industry sector. Therefore the value-added of rattan product will be increased."Gita Wirjawan explained.

It's also important to be known that one of the reasons of government for stopping rattan export was to dampen exploitation of rattan production forest, Gita Wirjawan added. ▲

Industrial downstream drove Non-oil Export

Indonesian no-oil export in January - September 2011 period was dominated by Industrial Goods. In that period industry sector export increased for 33.4 percent, from USD 68.8 billion to USD 91.8 billion. Meanwhile, non-oil export growth for 31.7 percent during January - September 2011 was coming from industrial product growth for 25 percent, mining sector 6.4 percent and agriculture sector 0.2 percent.

"Domination and increase of export from industrial goods sector is one of

indications that industry in this country keeps writhing along with socializations of industrial downstream," explained Trading Ministry, Gita Wirjawan to the press during Indonesian Export performance exposure at Ministries of Trade in early November.

During January - August 2011, most of 10 major products export value was increased, except cocoa product. Yet volume of processed cocoa export was increased for 86.4 percent, meanwhile cocoa beans was decreased for 50.1 percent.

The increase of processed cocoa

export and another manufacture product such as textile and textile product, rubber commodity and rubber product, footwear and automotive was indicated the increase of output on those industry manufacture sectors which also showed the prominent growth for government policy to drive industrial downstream.

The commodity that has the biggest growth of export value was rubber, coffee and palm with each growth is 70.7 percent, 52.6 percent and 50.2 percent.

According to Gita Wirjawan, the export growth of those three commodities were driven by demand and price increase in international market. ▲

Coal contracts and Index drove low calorie exploration

Government will use Indonesia Coal Index as price calculation standard of coal reference for low calorie coal about 3.400 kilo calories (kcal). With the existence of ICI in domestic coal market will be more efficient and transparent. In long term ICI will espouse the future contract price of coal commodity in Indonesian futures exchange.

That's one of topic that was mentioned by Director General of Mineral and coal of ESDM Ministry, Thamrin Sihite in his speech on ICI-5 launching from PT Coalindo Energy, in Jakarta, 10th of November 2011.

"The special index for this low rank will give advantage to all, both consumer and producer. For government

this ICI will give big contribution for policy making process, especially for determining royalty for coal mining company." Sihite said.

So far coal reference price was determining by 4 indexes, which are ICM, Platts-1, New Calste Export Index (NEX), and New Castle Global Coal Index (GC).

More further, Thamrin Sihite said the existence of ICI will drive coal user company to make a plan on price and coal volume that will be used. "If local futures exchange trades coal contracts, these 2 instruments will support each other to give contribution for consumer or investor in exploring low calories coal."

"Therefore we are really hoping in the near future, the coal futures exchange will be available in trading at local futures exchange." Thamrin Sihite explained.

Meanwhile, President Director of PT Coalindo Energy, Supriatna Suhala, explained that the current lowest coal price reference in Indonesia is for 3.950 kcal. Therefore to determine 3.400 kcal coal price, the entrepreneur usually referring to calorie of 6.322 kcal. For example, for the price of 5.000 kcal, the calculation is 5.000 per 6.322 multiplied by price, and that's extrapolation.

Unfortunately, Suhala added this price determination create some mistakes as the resulting price from extrapolation calculation does not show the actual price in the market.

"Therefore, the existence of ICI-5 will be closer to market price," Supriatna, who is also Executive Director of Indonesian Coal Mining Association, said. ▲

Indonesian Spice Import is increasing continually

Indonesia who well known as a producer of high quality spice in the world since the colonial period, currently becomes one of the biggest importers in the world. In fact Indonesian export rate for spice is still higher enough but in the other side, the import rate is also increasing continuously.

"The export is still increasing but import is increasing more, the final product of spice are herbal medicine, herb, food and drink product, and little bit cosmetic," The Vice Ministry of Trading Bayu Krisnamurthi said lately.

Based on the data from Trading Ministry, spice export in 2009 reached US\$ 796 million, then increased in

2010 to US\$ 1.165 million and from January - August 2011 reached US\$ 853 million. "Until the end of the year, export is predicted to increase but it will be not much around US\$ 1.2 - 1.3 billion," Bayu said.

In the other side, import rate in 2009 was recorded US\$ 409 million, increased to US\$ 539 million in 2010 and in January - August 2011 has reached US\$ 653 million. The prediction at the end of 2011 it will reach US\$ 750 - 800 million.

Bayu revealed, the spice type that is imported to Indonesia is semi processed spice product such as clove from Madagascar. Local importer was often imported spice product such as onion, ginger

and some other spices.

"Export is increasing, so is Import. It shows quite big domestic demand. Therefore government also wants national spice producer can add additional value to their products and also focus on domestic market and diversification of overseas markets," Bayu explained.

"Our producer exports US\$ 1.2 billion but we also import US\$ 653 billion. Just imagine that it's our export value and we also working on domestic market. Therefore government appraises that Indonesia have to utilize spice market share that quite big. Local industry needs product, but also needs middle industry to process spice so domestic market and also export will be worked on together." Bayu Krisnamurthi explained. ▲

Fatwa Perdagangan Komoditi Syariah

Pengantar Redaksi;

DSN-MUI pada 5 Agustus 2011, setelah melalui rapat pleno di Jakarta, akhirnya memutuskan Fatwa No. 82/DSN-MUI/VIII/2011, tentang perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah di bursa komoditi. Fatwa ini ditandatangani Ketua MUI, DR. K.H.M.A Sahal Mahfudh dan Sekretaris MUI, Drs. H.M Ichwansam. Karena keterbatasan halaman, Redaksi memotong beberapa bagian dari fatwa ini. Namun, tidak mengurangi esensi dari fatwa tersebut. Selengkapnya fatwa seperti berikut ini;

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO. 82/DSN-MUI/VIII/2011, Tentang PERDAGANGAN KOMODITI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DI BURSA KOMODITI

1 Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

1. Bursa adalah PT Bursa Berjangka Jakarta (Jakarta Futures Exchange) yang telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) untuk mengadakan kegiatan Pasar Komoditi Syariah;
2. Perdagangan adalah perdagangan komoditi di Bursa berdasarkan prinsip syariah berupa kegiatan jual beli komoditi antara Peserta Pedagang Komoditi dengan Peserta Komersil, antara Peserta Komersil dengan konsumen komoditi; dan dalam perdagangan dengan penjualan lanjutan, jual beli dilakukan antara Konsumen Komoditi dengan Peserta Pedagang Komoditi.
3. Perdagangan Serah Terima Fisik adalah perdagangan yang diakhiri dengan penerimaan komoditi secara fisik oleh Konsumen Komoditi sebagai pembeli;
4. Perdagangan dengan Penjualan Lanjutan adalah perdagangan yang dilanjutkan dengan penjualan komoditi oleh Konsumen Komoditi;
5. Komoditi di Bursa adalah komoditi yang dipastikan ketersediaannya untuk ditransaksikan di Pasar Komoditi Syariah sebagaimana ditetapkan oleh Bursa atas Persetujuan Dewan Pengawas Syariah, kecuali indeks dan valuta asing;
6. Penjual adalah Peserta Pedagang Komoditi, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang menjadi peserta komersil, atau konsumen komoditi
7. Pembeli adalah Peserta Komersil atau Konsumen Komoditi, dan Peserta Pedagang Komoditi dalam perdagangan dengan penjualan lanjutan;
8. Peserta Pedagang Komoditi adalah peserta yang menyediakan stock komoditi di Pasar Komoditi Syariah;
9. Peserta Komersil adalah LKS yang membeli komoditi dari pedagang komoditi
10. Konsumen komoditi adalah pihak yang membeli komoditi dari Peserta Komersil
11. Peserta Agen adalah pihak yang melaksanakan amanat Peserta Pedagang Komoditi atau melaksanakan amanat Peserta Komersil;
12. Wa'd adalah janji sepihak yang disampaikan salah satu pihak untuk melaksanakan suatu transaksi;
13. Bai' adalah jual beli yaitu pertukaran harta dengan

harta yang menjadi sebab perpindahannya kepemilikan objek jual beli;

14. Murabahah adalah penjualan suatu barang (komoditi) dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba;
15. Wakala adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh suatu pihak (muwakkil / pemberi kuasa) kepada pihak lain (wakil) untuk melakukan hal-hal yang boleh diwakilkan;
16. Qabd adalah penguasaan komoditi oleh pembeli yang menyebabkan ia berhak untuk melakukan tindakan hukum (tasharruf, seperti menjual) terhadap komoditi tersebut, menerima manfaat atau menanggung resikonya;
17. Qabdh Haqiqi adalah penguasaan komoditi oleh pembeli atas fisik komoditi yang dibelinya;
18. Qabdh Hukmi adalah penguasaan komoditi oleh pembeli secara dokumen kepemilikan komoditi yang dibelinya baik dalam bentuk catatan elektronik maupun non-elektronik; dan
19. Muqayadhadh adalah salah satu bentuk jual beli yang berupa pertukaran komoditi dengan komoditi lainnya, baik pertukaran antar komoditi yang sejenis maupun pertukaran antar komoditi yang berbeda jenis;

2 Ketentuan Hukum

Perdagangan Komoditi di Bursa, baik yang berbentuk Perdagangan Serah Terima Fisik maupun yang berbentuk Perdagangan Lanjutan, hukumnya boleh dengan memenuhi ketentuan yang diatur dalam fatwa ini.

3 Ketentuan mengenai Pergagangan

1. Komoditi yang diperdagangkan harus halal dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
2. Jenis, kualitas, dan kuantitas komoditi yang diperdagangkan harus jelas;
3. Komoditi yang diperdagangkan harus sudah ada (wujud) dan dapat diserahkan terimakan secara fisik;
4. Harga komoditi yang diperdagangkan harus jelas dan disepakati pada saat akad (Ijab qabul)
5. Akad dilakukan melalui penawaran dan penerimaan yang disepakati para pihak yang melakukan perdagangan dengan cara-cara yang lazim berlaku di Bursa;

6. Penjualan harus memiliki komoditi atau menjadi wakil pihak lain yang memiliki komoditi
7. Penjual wajib menyerahkan komoditi yang dijual kepada pembeli dengan tata cara dan waktu sesuai kesepakatan
8. Pembeli wajib membayar komoditi yang dibeli kepada penjual dengan tatacara dan waktu berdasarkan kesepakatan ; dan
9. Pembeli boleh menjual komoditi tersebut kepada selain penjual sebelumnya/pertama hanya setelah terjadi qabdh haqiqi atau qabdh hukmi atas komoditi yang dibeli.

4 Ketentuan mengenai Bursa

1. Bursa wajib membuat peraturan mengenai mekanisme perdagangan komoditi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah;
2. Bursa wajib membuat peraturan mengenai mekanisme yang memungkinkan terjadinya serah fisik komoditi yang diperdagangkan
3. Bursa tidak boleh membuat peraturan yang melarang terjadinya serah-terima fisik komoditi yang diperdagangkan;
4. Bursa wajib menyediakan sistem perdagangan di Bursa
5. Bursa wajib melakukan pengawasan terhadap perdagangan di Bursa;
6. Bursa boleh menetapkan syarat-syarat tentang pihak-pihak yang melakukan perdagangan di Bursa

5 Ketentuan mengenai Mekanisme Perdagangan Serah-Terima Fisik

1. Konsumen komoditi selaku pembeli memesan kepada Peserta Komersil dan berjanji (wa'd) akan melakukan pembelian komoditi
2. Peserta Komersil membeli komoditi dari sejumlah Peserta Pedagang Komoditi dengan pembayaran tunai (bai')
3. Peserta Komersil menerima dokumen kepemilikan yang berupa Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT) yang diterima oleh Bursa melalui sistem, sebagai bukti atas pembelian komoditi dari Peserta Pedagang Komoditi
4. Peserta Komersil menjual komoditi kepada Konsumen Komoditi dengan akad murabahah; dan diikuti dengan penyerahan dokumen kepemilikan
5. Konsumen Komoditi membayar kepada Peserta Komersil secara tangguh atau angsuran sesuai dengan kesepakatan dalam akad murabahah
6. Konsumen Komoditi menerima fisik komoditi tersebut dari Peserta Komersil

6 Ketentuan mengenai Mekanisme Perdagangan dengan Penjualan Lanjutan

1. Konsumen komoditi selaku pembeli memesan kepada Peserta Komersil dan berjanji (wa'd) akan melakukan pembelian komoditi
2. Peserta Komersil membeli komoditi dari sejumlah Peserta Pedagang Komoditi dengan pembayaran tunai (bai')
3. Peserta Komersil menerima dokumen kepemilikan yang berupa Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT) yang diterima oleh Bursa melalui sistem, sebagai bukti atas pembelian komoditi dari Peserta Pedagang Komoditi
4. Peserta Komersil menjual komoditi kepada Konsumen Komoditi dengan akad murabahah; dan diikuti dengan penyerahan dokumen kepemilikan
5. Konsumen Komoditi membayar kepada Peserta Komersil secara tangguh atau angsuran sesuai dengan kesepakatan dalam akad murabahah
6. Konsumen komoditi mendapat jaminan untuk menerima

komoditi dalam bentuk SPAKT dari peserta komersil; sehingga dengan demikian , telah terjadi qabdh hukmi

7. Konsumen komoditi boleh menjual komoditi kepada peserta pedagang secara tunai dengan akad bai' melalui Bursa selaku wakil pembeli (Peserta Pedagang Komoditi);

8. Peserta Pedagang Komoditi mewakilkan kepada Bursa untuk membeli komoditi secara tunai dengan akad wakalah;

9. Konsumen komoditi menyerahkan komoditi, dengan mengalihkan jaminan akan terjadinya secara fisik (SP-KAT) yang diterima dari Peserta Komersil sebagaimana dimaksud dalam butir 6

10. Konsumen komoditi menerima pembayaran tunai dari Peserta Pedagang Komoditi;

11. Settlement (penyelesaian transaksi) komoditi antar Peserta Pedagang Komoditi dilakukan dengan akad muqayadha

7 Ketentuan mengenai Agen dan Mekanisme Perdaganganannya

1. Penjual maupun pembeli komoditi di Bursa boleh menggunakan jasa agen dengan akad wakalah;

2. Agen penjual tidak boleh merangkap sebagai agen pembeli dalam transaksi yang sama / pada saat yang bersamaan;

3. Dalam hal agen penjual dalam kedudukannya sebagai wakil penjual merangkap sebagai pembeli dalam transaksi yang sama/pada saat yang bersamaan, kedudukan agen sebagai wakil gugur; selanjutnya agen berkedudukan sebagai pembeli;

4. Dalam hal kedudukan agen penjual sebagai wakil penjual, agen penjual tidak boleh menjanjikan keuntungan kepada penjual

5. Dalam hal kedudukan agen penjual sebagai pembeli, agen patuh pada ketentuan perdagangan, dan terikat pada hak dan kewajiban penjual-pembeli;

6. Dalam hal agen pembeli dalam kedudukannya sebagai wakil pembeli merangkap sebagai penjual dalam transaksi yang sama/pada saat yang bersamaan, kedudukan agen sebagai wakil gugur; selanjutnya agen berkedudukan sebagai penjual;

7. Dalam hal kedudukan agen pembeli sebagai wakil pembeli, agen pembeli tidak boleh menjanjikan harga yang pasti kepada pembeli

8. Dalam hal kedudukan agen pembeli sebagai pembeli, agen patuh pada ketentuan perdagangan, dan terikat pada hak dan kewajiban penjual pembeli

9. Ketentuan mengenai mekanisme perdagangan melalui agen merujuk pada ketentuan kelima dan keenam dalam fatwa ini;

8 Ketentuan Penutup

1. Jika terjadi perselisihan di antara pihak, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak tercapai kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai prinsip-prinsip syariah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.▲



*) Alfons Samosir,
Kepala Biro Hukum Bappebti

Alasan LKB Lebih Dari Satu

Lembaga kliring berjangka (LKB) merupakan badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan transaksi di bursa berjangka. LKB didirikan dengan tujuan mendukung terciptanya transaksi kontrak berjangka yang teratur, wajar, efisien, dan efektif di bursa berjangka. Sesuai dengan fungsinya, LKB merupakan sarana pelengkap bagi penyelenggaraan transaksi di bursa berjangka.

Berdasarkan UU. No 32/1997, tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, tugas utama LKB antara lain, menyediakan fasilitas yang cukup untuk terlaksananya penyelesaian transaksi kontrak berjangka, menyusun peraturan dan tata tertib LKB sebagai pedoman para anggota dalam melaksanakan kegiatannya. Dan, memungut dana jaminan sebagai instrumen untuk melindungi nasabah agar

transaksi berjalan sebagaimana mestinya.

Atas dasar hal tersebut, peranan LKB sangat strategis untuk menjamin terlaksananya transaksi bursa berjangka yang fair dan transparan.

Beberapa waktu lalu, saat pembahasan perubahan UU No. 32/1997, tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang dilakukan Komisi VI DPR RI, ada wacana dari kalangan legislatif tentang LKB ini. Seperti yang tertera dalam DIM No. 140 (pasal 25 ayat 3) RUU tentang Perubahan Atas UU No. 32/1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Komisi VI DPR RI mengusulkan rumusan mengenai lembaga kliring sebagai berikut: *"Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan kepada satu badan usaha yang terpisah dari bursa berjangka dan bersifat mandiri"*.

Atas draft DPR yang tercantum dalam DIM 140 (pasal 25 ayat 3), itu, pemerintah mengajukan usulan sebagai berikut: *"Izin usaha sebagaimana*

pada ayat (2) hanya diberikan kepada badan usaha yang terpisah dari bursa berjangka dan bersifat mandiri".

DIM No.140 yang merupakan draft yang disusun atas inisiatif DPR mengusulkan hanya satu LKB, sementara usulan pemerintah menekankan bahwa tidak ada pembatasan LKB walaupun tidak secara spesifik disebutkan dalam draft usulan dalam DIM 140.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) selaku unit di bawah Kementerian Perdagangan yang sehari-hari bergelut dengan sektor perdagangan berjangka ini, tidak dapat menyetujui usulan DPR untuk membatasi pemberian izin LKB hanya kepada satu perusahaan saja. Bappebti berpendirian bahwa melihat sifat dan karakteristik kegiatan bursa berjangka yang sangat variatif (heterogenis) maka untuk Indonesia, yang paling baik adalah tidak membatasi jumlah lembaga kliring berjangka.

Terkait dengan itu, Bappebti memiliki beberapa alasan, yakni sebagai berikut;

1. Lembaga Kliring Berjangka adalah mitra pendukung utama yang tidak terpisahkan dari bursa berjangka (*incorporated*).

Adalah suatu kenyataan yang tidak terbantahkan bahwa di dunia ini bahwa setiap bursa memiliki LKB sendiri. Bentuk dan status LKB tersebut berbeda beda satu sama lain. Terdapat LKB didirikan dalam bentuk badan hukum perusahaan yang berdiri sendiri terpisah dari bursanya. Cukup banyak bursa melakukan kerja sama dengan LKB yang statusnya terpisah dari bursa itu sendiri. Namun banyak juga bursa yang lembaga kliringnya berada dalam bursa itu sendiri dan dibuat dalam bentuk satu divisi kliring. Dalam hal ini LKB adalah ba-

gian yang tidak terpisahkan dari struktur dan manajemen bursa itu sendiri.

Contoh, LKB seperti di Taiwan Futures Exchange (TFX), Agricultural Futures Exchange of Thailand, Korea Exchange, Singapore Commodity Exchange., BM&FBOVESPA - Brazil, CBOT, Chicago Merchantile Exchange, NYMEX - CME Group dan lain lain.

Alasan utama baik kliring yang terpisah maupun dengan sistem yang melekat seperti dijelaskan di atas adalah demi efisiensi dan spesialisasi. Bursa dan kliring pada dasarnya harus *incorporated* karena dua-duanya mengemban misi yang sama, yang saling komplementer di mana bursa sebagai sarana untuk melakukan transaksi sementara kliring melakukan penjaminan atas terlaksananya transaksi. Dalam banyak hal, program kerja bursa harus sejalan dengan program kerja kliring. Atas dasar tersebut, bursa se-

lalu mendirikan kliring sendiri untuk dapat secara profesional mengemban tugas penjaminan yang merupakan tahap akhir dari proses transaksi di bursa berjangka.

2. Menghindari praktek monopoli

Mencermati apakah penetapan “satu” LKB yang akan disepakati dalam RUU Perubahan UU No 32/1997, DIM No. 140 (halaman 43), pada dasarnya sudah bertentangan dengan UU No.5/1999, tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat. Dalam kaitan itu, Bappebti pada 15 Juni 2010, mengadakan konsultasi dengan pejabat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan dari hasil konsultasi tersebut didapat catatan sebagai berikut:

Setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak terjadi pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu.

Pengecualian praktik monopoli hanya mungkin dilaksanakan bagi pelaku usaha yang berdasarkan dan diatur menurut Pasal 50, UU No. 5/1999.

Sementara itu, berdasarkan Pasal 51 dari UU No 5/1999, monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi data atau pemasaran barang dana atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah. Dari berbagai referensi, maka yang dimaksud dengan hajat hidup orang banyak antara lain: pangan, air, perumahan, energi, transportasi, jasa pos dan lain-lain.

Atas dasar penjelasan di atas, sesuai dengan konsultasi dengan pejabat KPPU, dapat disimpulkan bahwa LKB tidak termasuk dalam kategori pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 50. Dapat dipastikan pula bahwa LKB dengan segala kegiatannya bukanlah pembawa misi khusus dari negara untuk melaksanakan kegiatan ekonomi yang terkait erat dengan hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, seperti pengelolaan air minum, kelistrikan, transportasi, pangan, energi dan lain-lain.

Melihat sifat dari kegiatan dari LKB, maka menetapkan jumlah lembaga kliring pada hanya satu perusahaan saja dapat dipastikan akan menimbulkan praktek monopoli yang pada gilirannya akan menjurus kepada tindakan sewenang-wenang khususnya dalam menentukan dana jaminan dan besarnya margin. Akibat negatif lainnya yang akan timbul apabila kliring dibatasi hanya satu adalah terjadinya inefisiensi dan tidak akan fokus sesuai dengan ruang lingkup kegiatan bisnis dari bursa.

Praktek monopoli yang pasti akan terjadi dan akan menghambat perkembangan bursa berjangka adalah penetapan margin dan dana penjaminan yang pasti dilakukan sendiri tanpa ada pembandingan dari lembaga kliring lain.

3. Mengurangi resiko wanprestasi Lembaga Kliring Berjangka.

Dalam hal perdagangan berjangka di suatu negara berkembang seperti Indonesia dikemudian hari telah berkembang dengan pesat, maka resiko wanprestasi dalam perdagangan berjangka tersebut dapat disebar ke beberapa Lembaga Kliring Berjangka, yang lebih mampu menanggung beban resiko sesuai dengan kemampuan permodalannya.

4. Lembaga Kliring Berjangka dapat memberikan pelayanan lebih baik dan terfokus.

Dalam hal perkembangan perdagangan berjangka di suatu negara berkembang dengan pesat, maka diperlukan adanya spesialisasi Lembaga Kliring Berjangka sesuai dengan resiko dari produk kontrak berjangka yang dikelolanya (Misalnya pelayanan kliring dan penjaminan untuk Bursa Berjangka yang meperdagangkan barang tambang tentu berbeda dengan pelayanan kliring dan penjaminan untuk Bursa Berjangka yang meperdagangkan barang pertanian).

5. Membuka lapangan kerja.

Dalam hal perkembangan perdagangan berjangka di suatu negara berkembang dengan pesat, maka pendirian beberapa Lembaga Kliring Berjangka dapat membuka lapangan pekerjaan baru.

6. Bursa di Indonesia dimasa mendatang (alasan spesifik).

Indonesia adalah suatu negara yang sangat beruntung yang mendapat berkat karunia berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dari luasnya bumi Indonesia menghasilkan beragam komoditi pertanian, perkebunan dan pertambangan yang merupakan komoditi ekspor untuk kebutuhan pasar Internasional. Berbagai komoditi penting dunia itu, tersebar di semua pulau besar Indonesia. Dan, semua komoditi itu sangat layak untuk diperdagangkan di bursa berjangka komoditi.

Dengan kondisi seperti ini, suatu saat sangat dimungkinkan untuk mendirikan bursa di propinsi tertentu yang kaya dengan sumber daya alam. Misalnya, Sumatera dengan komoditi pertanian dan perkebunan, Kalimantan dan Sulawesi untuk barang tambang. Apabila hal ini terjadi, berarti bursa tersebut harus memiliki kliring sendiri di daerah sesuai dengan spesialisasinya.

Hal itu sangat mungkin terjadi di masa mendatang sebagaimana di India, di sana terdapat beberapa bursa yang didirikan di berbagai propinsi. Dengan demikian, akan sangat merugikan kepentingan nasional apabila UU PBK hanya mengatur atau menetapkan satu kliring saja.

Sehingga, dapat dikatakan bahwa dalam konteks Indonesia yang begitu luas dan memiliki berbagai jenis komoditi yang satu sama lain berbeda, pembatasan LKB hanya satu (sentralisasi) akan menghambat perkembangan bursa berjangka yang ingin didirikan di daerah propinsi (regional) sesuai dengan spesialisasi komoditi tertentu yang ada di wilayah tersebut.▲



Lebih Nyaman

Transaksi Multilateral

Hari Setiobudi

“Saya tidak takut ketinggian. Tetapi ketika badan pesawat akan landing di landasan pacu bandara, saya sungguh ketakutan. Saya trauma setiap melihat pemberitaan pesawat yang gagal landing. Memang saya belum pernah mengalami peristiwa seperti itu, dan mudah-mudahan jangan pernah, ya. Makanya, kalau mau mengunjungi kantor cabang, kalau bisa lewat darat saya akan memilih transportasi darat,” demikian pengakuan jujur Hari Setiobudi, Direktur Kepatuhan, PT Victory International Futures (VIF).

Dengan nada berkelakar, Hari, begitu dia akrab dipanggil, mengakui, “mengunjungi kantor cabang atau bepergian dengan pesawat saya pasti sibuk mencari tahu berapa panjang landasan pacu bandara tersebut. Kalau landasan pacunya cukup panjang, saya akan nyaman. Tetapi kalau pendek seperti di Jogja dan Medan, jantung saya pasti berdegub kencang. Inilah tantangan berat buat saya saat mengunjungi kantor cabang di daerah.”

“Tetapi kalau sudah ditugaskan dan memang saya diperlukan di kantor cabang tersebut, saya pasti akan berangkat. Karena itu tanggungjawab saya,” tegasnya.

VIF merupakan anggota Jakarta Futures Exchange (JFX) dan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI). Izin usaha perusahaan ini semula atas nama PT Platinum Berjangka. Dan sejak tahun 2008, setelah diakuisisi manajemen baru berubah menjadi PT Victory International Futures. Perusahaan ini berkantor pusat di Surabaya, Jatim, di kota ini, ada

satu cabang VIF. Selebihnya, ada sebanyak delapan cabang VIF yang tersebar di berbagai daerah, masing-masing di Kota Medan, Manado, Malang, Jember, Jogja, Semarang, Bandung, dan Pontianak. Tahun 2012 mendatang rencananya akan didirikan satu kantor cabang lagi di Kota Denpasar, Bali.

VIF cukup menonjol pada transaksi kontrak berjangka multilateral. Tahun 2010, VIF masuk dalam jajaran tiga besar anggota BKDI yang bertransaksi kontrak berjangka CPO dan Gold dengan volume transaksi terbesar. “Untuk transaksi bilateral kami belum apa-apa. Tetapi tahun 2012 nanti, diharapkan bisa masuk dalam jajaran 20 besar.”

“Sejak badan pengawas mengeluarkan kebijakan transaksi minimum 5 % kontrak multilateral, kami sudah siap dengan tim commodity desk. Mungkin diantara perusahaan pialang yang ada, kami ‘lah yang pertama memiliki commodity desk. Hal itu saat bersamaan keluarnya kebijakan tersebut, kami memiliki investor dari Manado yang siap transaksi CPO. Oleh karena itu pula Victory mendirikan cabang di Manado,” kata suami Rahmawati, ini.

“Sekedar informasi, di awal bulan November 2011, lalu, kami juga baru mendapatkan calon nasabah dari Australia yang siap menggelontorkan margin awal sebesar Rp 1,5 miliar,” ungkap ayah dari dua anak ini.

“Jadi bisa anda hitung sendiri berapa besar nilai transaksi investor itu. Memang bagi nasabah asing, kami memberi batasan minimum untuk margin awal minimal Rp 400 juta,” tambahnya.

“Melihat perkembangan industri ini dengan kemudahan transaksi on-line,

kami tidak berpikir untuk pindah ke Jakarta. Kami sudah tetapkan lebih fokus menggarap Wilayah Timur Indonesia. Semula memang ada wacana memindahkan Victory ke Jakarta, tetapi kemudian kami pikir potensi di Surabaya saja besar dan pula pengurusnya semua ada di sini,” kata pria kelahiran Sidoarjo, Jatim, 26 Juni 1961, ini.

Bagi ayah dari Aprina Inayati Utami dan Faisal Suyudul Annas, ini, industri perdagangan berjangka komoditi sudah merupakan labuhan terakhir hidupnya. “Dengan casing seperti ini, siapa lagi yang mau menerima saya,” selorohnya sambil mengebulkan asap rokok kereteknya.

“Secara ekonomis saya sudah cukup sejahtera dengan apa yang miliki saat ini. Dan itu sudah saya nikmati sejak masih tenaga marketing,” ujar Alumnus Fak. Pertanian, UGM, 1985, itu.

“Pahit getir di industri ini sudah saya rasakan sejak 1992. Kalau yang manis-manisnya sudah pasti enak ‘lah. Pernah ada pengalaman pahit, ketika kami sedang serius bertransaksi, tiba-tiba di grebek Polisi. Kantor kami di Police Line, dan kami keluar gedung itu satu-persatu dengan berjalan menunduk Police Line. Rasanya malu dan was-was dilihati orang sekitar,” tutur Hari.

“Bertolak dari pengalaman itu, selaku direktur kepatuhan selalu saya menekankan pada teman-teman Wakil Pialang Victory untuk senantiasa berhati-hati. Alhamdulillah sepanjang tahun 2010, lalu, hingga saat ini belum ada permasalahan dengan nasabah, mudah-mudahan demikian seterusnya,” imbuh Hari Setiobudi, pehobi olah raga billiard, itu. ▲